



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, perlu dicabut karena tidak lagi termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1962);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR
16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 16 Seri C.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 28 Juni 2011



WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 28 Juni 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG



BUDI HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI C.6

100



BAB V	VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1 Visi	V-1
	5.2 Misi	V-3
	5.3 Tujuan	V-3
	5.4 Sasaran	V-4
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
	6.1 Misi 1: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	VI-1
	6.1.1 Strategi untuk Misi 1	VI-1
	6.1.2 Arah Kebijakan untuk Misi 1	VI-1
	6.2 Misi 2: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas dan Islami	VI-2
	6.2.1 Strategi untuk Misi 2	VI-2
	6.2.2 Arah Kebijakan untuk Misi 2	VI-2
	6.3 Misi 3: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	VI-3
	6.3.1 Strategi untuk Misi 3	VI-3
	6.3.2 Arah Kebijakan untuk Misi 3	VI-3
	6.4 Misi 4: Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah	VI-4
	6.4.1 Strategi untuk Misi 4	VI-4
	6.4.2 Arah Kebijakan untuk Misi 4	VI-5
	6.5 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota	VI-6
	6.5.1 Strategi untuk Misi 5	VI-6
	6.5.2 Arah Kebijakan untuk Misi 5	VI-7
	6.6 Misi 6: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berbudaya	VI-7
	6.6.1 Strategi untuk Misi 6	VI-7
	6.6.2 Arah Kebijakan untuk Misi 6	VI-8
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
	7.1 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 1	VII-1
	7.2 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 2	VII-8
	7.3 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 3	VII-14
	7.4 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 4	VII-19
	7.5 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 5	VII-28
	7.6 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 6	VII-30
	7.7 Prioritas Pembangunan Daerah	VII-39
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
	10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2019	X-1
	10.2 Kaidah Pelaksanaan	X-1
	10.3 Pengendalian dan Evaluasi	X-2
BAB XI	PENUTUP	XI-1

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang Panjang	II-1
2.2 Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang dan Tingkat Kepadatannya Tahun 2008-2012	II-5
2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2008-2012	II-5
2.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012	II-6
2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	II-6
2.6 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM Kota Padang Panjang Tahun 2011-2012	II-7
2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-8
2.8 PDRB ADHK dan ADHB Serta Perkembangannya Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-9
2.9 Perkembangan Sektor Perekonomian PDRB Kota Padang Panjang ADHB Tahun 2008-2012	II-10
2.10 Perkembangan Sektor Ekonomi PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012	II-11
2.11 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-11
2.12 Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012	II-12
2.13 PDRB Perkapita Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-13
2.14 Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-14
2.15 Angka Pengangguran Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-15
2.16 Angka Melek Huruf Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012	II-15
2.17 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012	II-16
2.18 APK Kota Padang Panjang Tahun 2009-2012	II-16
2.19 APM Kota Padang Panjang Tahun 2009-2012	II-17
2.20 Angka Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012	II-18
2.21 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-19
2.22 Rasio Guru dan Murid Tahun 2008-2012	II-19
2.23 Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2007-2011	II-20
2.24 Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2008-2012	II-20
2.25 Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang	II-21
2.26 Banyaknya sekolah, Murid, Guru dan kelas di lingkungan Departemen Agama di Kota Padang Panjang Tahun 2013	II-21
2.27 Perkembangan Indikator Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-22
2.28 Lingkungan Sehat Kota Padang Panjang Tahun 2008 s.d 2012	II-23
2.29 Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2010-2012	II-24
2.30 Jumlah Tenaga Medis, Para Medis dan Tenaga Lainnya pada Pelayanan Kesehatan Tahun 2012	II-25
2.31 Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010-2011	II-25

2.32	Penertiban Dokumen dan Akta Pada Tahun 2009-2012 Kota Padang Panjang	II-30
2.33	Target dan realisasi Akseptor KB Kota Padang Panjang Tahun 2010-2012	II-32
2.34	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012 Kota Padang Panjang	II-33
2.35	Perkembangan Koperasi Tahun 2008-2012 Kota Padang Panjang	II-36
2.36	Produktifitas Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2010-2012	II-50
2.37	Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-51
2.38	Perkembangan Populasi Ternak Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-51
2.39	Perkembangan Luas dan Produksi Perikanan Darat Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-52
2.40	Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Kota Padang Panjang Tahun 2010-2012	II-54
2.41	Perkembangan Pariwisata di Kota Padang Panjang Tahun 2009-2012	II-54
2.42	Pengeluaran Riil Perkapita Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012	II-55
2.43	Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012	II-56
2.44	Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi Kota Padang Panjang Tahun 2012	II-56
2.45	Rasio Ketergantungan Kota Padang Panjang Tahun 2007-2011	II-57
2.46	Perkembangan Investasi Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-57
3.1	Rencana dan Realisasi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-2
3.2	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-5
3.3	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-7
3.4	Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-8
3.4	Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-11
3.5	Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2008-2012	III-12
3.6	Pertumbuhan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-13
3.7	Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2008-2012	III-14
3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-14
3.9	Defisit Riil Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-15
3.10	Realisasi SILPA Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	III-15
3.11	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2008-2012	III-17
3.12	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang	III-18
3.13	Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang	III-19
3.14	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang	III-19
6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Padang Panjang	VI-9
7.1	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi I Kota Padang Panjang	VII-2

7.2	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi II Kota Padang Panjang	VII-7
7.3	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi III Kota Padang Panjang	VII-14
7.4	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi IV Kota Padang Panjang	VII-20
7.5	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi V Kota Padang Panjang	VII-32
7.6	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi VI Kota Padang Panjang	VII-36
8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Padang Panjang	VIII-2
8.2	Rekapitulasi Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	VIII-
9.1	Penetapan Indikator Kinerja daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Padang Panjang	IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-8
2.2	PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012	II-9
2.4	Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012	II-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya pembangunan dapat dipandang sebagai upaya atau proses untuk mewujudkan kehidupan suatu daerah atau negara kearah yang lebih baik. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diperlukan dukungan perencanaan pembangunan yang komprehensif, responsif, efektif dan efisien. Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dilihat dari aspek waktu perencanaan, maka perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 3 (tiga), yakni : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1(satu) tahun. Masing-masing perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, serta menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*.

Dalam kaitan ini, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih masa jabatan tahun 2013-2018. Pada dasarnya substansi RPJMD ini memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan disusun mengacu pada RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005-2025. Dengan demikian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 merupakan RPJMD kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2010 Nomor 18 Seri D.5);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 17 Seri D.4);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 19 Seri D.6);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 37 Seri D.8);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, tentunya mempunyai keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota terpilih, dengan memperhatikan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.
2. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis, yang proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW daerah *hinterland*, sebagai upaya untuk mengintegrasikan rencana pembangunan Kota Padang Panjang.
3. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
4. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2014 sampai dengan RKPD tahun 2018, serta Rencana Kerja (Renja SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2014 sampai dengan 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
Memuat Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta kebijakannya.
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, program serta prioritas pembangunan daerah.
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
Memuat urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam pencapaian *outcome* tahunan selama periode 2013-2018.
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**
Memuat ketentuan peralihan untuk penyusunan RKPDP transisi tahun 2019, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dari rencana yang telah disusun.
- BAB XI PENUTUP**

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan pedoman bagi pemerintah Kota Padang Panjang, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder pembangunan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Padang Panjang dengan visi, misi dan program pembangunan dari Walikota terpilih, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan saling bersinergi, koordinatif, dan komprehensif. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 antara lain sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi Walikota terpilih kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 sampai dengan 2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.

- b. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Kota Padang Panjang dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2018.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Wilayah dan Lokasi

a. Kondisi Geografis

Kota Padang Panjang terletak pada posisi 100° 20' dan 100° 04' Bujur Timur serta 0° 27' dan 0° 32' Lintang Selatan di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah secara keseluruhannya adalah 2.300 Ha atau 23 Km². Luas wilayah Kota Padang Panjang mencapai 0.05% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Batusangkar. Di samping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, maka Kota Kecil Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja tanggal 25 September Tahun 1957 Nomor 12/K/DPRD-PP/57, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982, Kota Padang Panjang terdiri atas 2 Kecamatan dengan 16 Kelurahan, di mana masing - masing Kecamatan terdiri dari 8 Kelurahan dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Barat Berbatas dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Adapun gambaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang Panjang

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A.	Kecamatan Padang Panjang Barat	975	42,39
	1. Silaing Bawah	261	11,35
	2. Silaing Atas	54	2,35
	3. Pasar Usang	59	2,57
	4. Kampung Manggis	316	13,74
	5. Tanah Hitam	72	3,13
	6. Pasar Baru	23	1,00
	7. Bukit Surungan	121	5,26
	8. Balai-Balai	69	3,00
B.	Kecamatan Padang Panjang Timur	1.325	57,61
	1. Koto Panjang	133	5,78
	2. Koto Katik	101	4,39
	3. Ngalau	145	6,30
	4. Ekor Lubuk	280	12,17
	5. Sigando	140	6,09
	6. Ganting	310	13,48
	7. Guguk Malintang	190	8,26
	8. Tanah Pak Lambik	26	1,13
Jumlah/Total		2.300	100,00

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

b. Topografi dan Geologi

Secara topografis Kota Padang Panjang memiliki dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Topografi Kota Padang Panjang yang tidak rata mengakibatkan sebagian besar lahan yang ada tidak mungkin dimanfaatkan untuk pemukiman. Kondisi fisik permukaan tanah Kota Padang Panjang terdiri dari mikro relief yang miring dari Utara ke Selatan dan sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan. Tanahnya merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk usaha pertanian.

Hasil Kajian Penilaian Resiko Bencana Gempa Bumi dan Bahaya Gunung Berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Pusat Survei Geologi, Bandung, menunjukkan secara umum formasi geologi Kota Padang Panjang terdiri dari batuan malihan, batuan tufaan aliran piroklastik, batuan tufaan, dan lahar II. Kemudian dari struktur geologinya terdapat satu sesar aktif yang melewati Kota Padang Panjang yaitu sesar Bukit Jarat dan satu lagi berdekatan dengan Kota Padang Panjang (pada bagian timur) yaitu Sesar Sumatera.

c. Iklim dan Hidrologi

Letak Kota Padang Panjang yang berada pada dataran tinggi, maka Kota Padang Panjang beriklim sejuk dengan suhu maksimum mencapai 26,1^o C dan minimum 21,8^o C. Curah hujan tahunan juga cukup tinggi rata-rata berkisar 270 hari per tahun atau 4.822 mm. Kelembaban udara paling tinggi adalah 100^o C dan terendah rata-rata 60^o C.

Rata-rata temperatur udara di Kota Padang Panjang adalah 21,88^o C. Selama tahun 2012, curah hujan di Kota Padang Panjang adalah 4.190,7 mm dengan total hari hujan 266 hari. Curah hujan tertinggi terjadi bulan November dengan jumlah curah hujan 614,7 mm dengan total hari hujan 28 hari. Curah hujan terendah terjadi bulan Juni dengan jumlah curah hujan 156,5 mm dengan total hari hujan 13 hari.

Kota Padang Panjang mempunyai tekanan udara rata - rata 945,07 mbar dan penguapan air rata-rata 2,88 mm. Penyinaran matahari di Kota Padang Panjang selama tahun 2012 mencapai 45,70%. Kecepatan rata - rata angin adalah 4,30 knot dengan rata - rata arah angin 199,7 derajat. Sedangkan petir yang terjadi di Padang Panjang untuk tahun 2012 yang terekam oleh alat dari Stasiun Geofisika adalah 10.716.442 kali.

d. Potensi pengembangan wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah overlay antara peta potensi pengembangan perkotaan dan peta potensi rawan bencana alam. Selanjutnya dilakukan pendekatan dengan membuat matriks keterkaitan antara kedua aspek tersebut yang menghasilkan empat kelas daya dukung.

Berdasarkan analisa RTRW Kota Padang Panjang, potensi pengembangan perkotaan di wilayah Kota Padang Panjang secara ideal tidak terlalu besar, hanya meliputi $\pm 31,09\%$ dari luas wilayah Kota Padang Panjang (daya dukung tinggi dan sedang). Namun dengan adanya rekayasa teknologi bangunan dan infrastruktur, maka masalah keterbatasan daya dukung fisik ini bisa diatasi, sehingga potensi pengembangan perkotaan Kota Padang Panjang semakin besar.

Sesuai dengan RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Pusat pelayanan kota meliputi:
 - a. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
 - b. Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.
2. Subpusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi :
 - a. Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
 - b. Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
 - c. Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
 - d. Kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
 - e. Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.
3. Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi:
 - a. Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
 - b. Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
 - c. Pusat lingkungan di Kelurahan EkorLubuk;
 - d. Pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;

- e. Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
- f. Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
- g. Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
- h. Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

e. Wilayah Rawan Bencana

Hasil kajian penilaian resiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang) dan hasil observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kota Padang Panjang terdiri dari :

1. Bencana Gempa Bumi

Kota Padang Panjang dapat dibagi atas lima zona kerentanan yakni :

a. Zona I (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sangat tinggi)

Bentang alam lajur ini merupakan bagian dari bentang alam struktural vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng 2 – 15° yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik dan Guguk Malintang.

b. Zona I A (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi)

Bentang alam lajur ini merupakan bagian bentang alam struktural vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng bervariasi 0 – 15% yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.

c. Zona IB (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi – sedang)

Bentang alamnya merupakan bagian dari bentang alam bentukan asal vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng bervariasi antara 0 – 12% dan 2 – 15% yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.

d. Zona II (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang)

Zona II ini secara dominan berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai-Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan Koto Panjang.

e. Zona III (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang – rendah)

Zona III ini secara dominan berlokasi pada seluruh Kelurahan di Kota Padang Panjang, kecuali Silaing Atas dan Tanah Pak Lambik

2. Bencana Letusan Gunung Api

Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8 – 14 Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Daerah potensi resiko bahaya aliran Gunung Marapi yang akan datang ditentukan berdasarkan kondisi bentang alam wilayah yang dicerminkan konfigurasi topografi masa kini. Daerah-daerah tersebut dicirikan oleh lembah-lembah sungai yang berhulu langsung dari puncak Marapi. Di Kota Padang Panjang daerah-daerah potensi tersebut dapat dijumpai di sepanjang aliran Sungai Batang Anai (DAS Anai), Sungai Pasar Baru dan Sungai Tanang (DAS Andok), Sungai Kendangan-Sibunian (DAS Rupit), Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Sikakeh (DAS Sikakeh).

3. Bencana Longsor (Gerakan Tanah)

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan > 40 %. Kemudian berdasarkan data wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2010

(Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 potensi gerakan tanah yaitu potensi menengah – tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan potensi menengah di Kecamatan Padang Panjang Timur. Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah akan mengalami pergerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah, akan mengalami pergerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

2.1.2. Demografis

Dilihat dari aspek demografis, dapat dikemukakan bahwa jumlah penduduk Kota Padang Panjang secara fluktuatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 penduduk Kota Padang Panjang adalah 54.218 jiwa. Sedangkan menurut BPS, tahun 2009 penduduk Kota Padang Panjang turun menjadi sebanyak 46.365 jiwa. Selanjutnya hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Padang Panjang adalah sebanyak 47.069 jiwa, serta meningkat menjadi 47.619 jiwa pada tahun 2011. Sedangkan tahun 2012, sesuai dengan proyeksi BPS, jumlah penduduk Padang Panjang adalah sebanyak 48.187 jiwa. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk dari tahun 2008 sampai tahun 2012 rata-rata bergerak dari 2.357 jiwa per km² tahun 2008, menjadi 2.095 jiwa per km² tahun 2012.

Berikut gambaran perkembangan jumlah penduduk Kota Padang Panjang dan tingkat kepadatannya dari tahun 2008-2012 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.2.2
Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang dan Tingkat Kepadatannya
Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Ket.
2008	54.218	2357	
2009	46.365	2015	
2010	47.069	2046	
2011	47.619	2070	
2012	48.187	2095	

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

Dilihat komposisi penduduk Kota Padang Panjang menurut jenis kelamin, ternyata dari tahun 2008 - 2012 jumlah penduduk perempuan di Kota Padang Panjang lebih banyak dari penduduk laki - laki. Adapun rinciannya seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin
Tahun 2008-2012

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2008	26.135	28.083	54.218
2009	22.831	23.534	46.365
2010	23.399	23.670	47.069
2011	23.664	23.955	47.619
2012	23.946	24.241	48.187

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

Untuk sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin, per Kecamatan dan Kelurahan pada tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.4.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Silaing Bawah	2.298	2.479	4.777
2	Silaing Atas	1.084	966	2.050
3	Pasar Usang	1.829	2.161	3.990
4	Kampung Manggis	2.781	2.614	5.395
5	Tanah Hitam	1.575	1.600	3.175
6	Pasar Baru	676	634	1.310
7	Bukit Surungan	1.106	1.056	2.152
8	Balai-Balai	2.624	2.725	5.349
	Kec. Padang Panjang Barat	13.974	14.235	28.210
1	Koto Panjang	1.739	1.675	3.414
2	Koto Katik	440	436	876
3	Ngalau	1.412	1.410	2.823
4	Ekor Lubuk	1.043	1.004	2.048
5	Sigando	725	706	1.431
6	Ganting	1.037	1.092	2.130
7	Guguk Malintang	2.644	2.817	5.460
8	Tanah Pak Lambik	931	865	1.796
	Kec. Padang Panjang Timur	9.971	10.006	19.977
	Kota Padang Panjang	23.946	24.241	48.187

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

Sedangkan komposisi penduduk Kota Padang Panjang menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Kelompok Umur	Kecamatan Padang Panjang Barat	Kecamatan Padang Panjang Timur	Jumlah
0 - 4	2.964	1.999	4.964
5 - 9	2.858	2.019	4.877
10 - 14	2.973	2.105	5.078
15 - 19	2.543	2.103	4.646
20 - 24	2.171	1.630	3.801
25 - 29	2.214	1.404	3.618
30 - 34	2.168	1.452	3.619
35 - 39	1.973	1.406	3.379
40 - 44	1.822	1.192	3.014
45 - 49	1.588	1.119	2.707
50 - 54	1.486	990	2.476
55 - 59	1.213	832	2.045
60 - 64	762	573	1.334
65 - 69	537	393	930
70 - 74	439	318	758
75+	499	441	940
Total	28.210	19.977	48.187

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam aspek ini dipaparkan tentang fokus

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga. Indikator yang terdapat dalam ketiga fokus tersebut pada dasarnya adalah indikator yang termuat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai oleh daerah dan target-target *Millenium Development Goals* (MDG's) yang pencapaiannya juga harus didukung oleh daerah.

Sampai tahun 2013 ada 15 bidang SPM yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi pencapaian target indikator SPM Kota Padang Panjang Tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Evaluasi Pencapaian Indikator SPM Kota Padang Panjang
Tahun 2011 dan 2012

NO	BIDANG	Capaian (%)	
		2011	2012
1	Bidang Kesehatan	81.40	78.98
2	Bidang Sosial	50.58	58.21
3	Bidang Lingkungan Hidup	31.25	66.53
4	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	103.89	133.86
5	Bidang Perumahan Rakyat	-	-
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	82.29	41.67
7	Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	71.88	75.57
8	Bidang Pendidikan Dasar	88.30	50.00
9	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	27.19	35.63
10	Bidang Ketenagakerjaan	27.51	29.88
11	Bidang Kominfo	58.07	63.16
12	Bidang Ketahanan Pangan	-	118.23
13	Bidang Kesenian	171.01	99.32
14	Bidang Perhubungan	0.71	-
15	Bidang Penanaman Modal	87.14	87.14
	RATA-RATA	67,79	72,17

Sumber : Laporan Capaian SPM Kota Padang Panjang Tahun 2013,
Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB, baik melalui pendekatan harga konstan maupun harga berlaku, PDRB per kapita, dan juga Indeks Pembangunan Manusia karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam pertumbuhan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah.

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

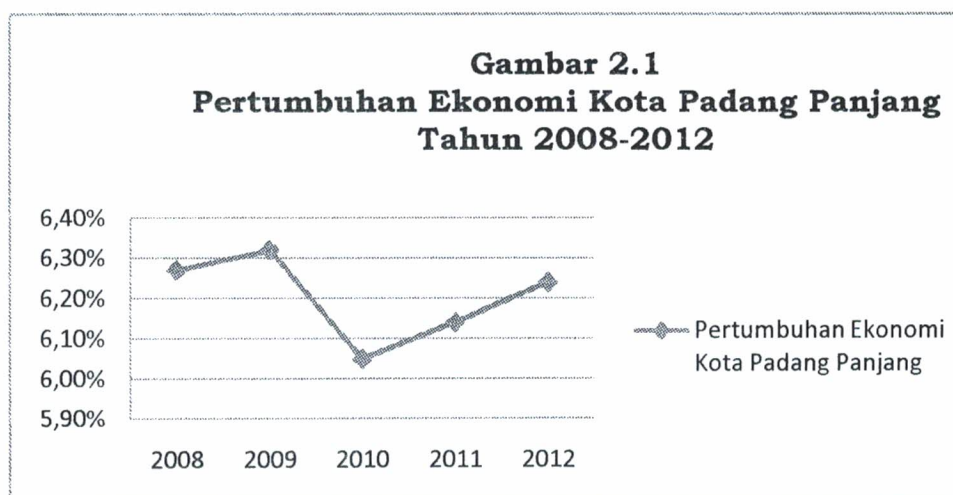
Secara makro, perkembangan perekonomian Kota Padang Panjang cukup baik dan kecenderungannya menunjukkan peningkatan atau trend positif dari tahun - tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2008 sebesar 6,27%, turun menjadi 6,24 pada tahun 2012. Pada Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sempat terkoreksi turun menjadi 6,05%, sebagaimana yang juga terjadi di Sumatera Barat akibat terjadinya musibah gempa tanggal 30 September 2009.

Adapun gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.6 dan gambar 2.1 berikut:

Tabel.2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang
Tahun 2008 - 2012

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2008	6,27
2009	6,32
2010	6,05
2011	6,14
2012	6,24

Sumber : BPS Kota Padang Panjang



Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat juga dilihat pada pertumbuhan PDRB, yang merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan non ekonomi pada suatu daerah. Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000, dapat dilihat bahwa PDRB Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2008 PDRB adalah sebesar Rp.373, 2 Milyar, naik menjadi Rp.396,8 Milyar pada tahun 2009. Selanjutnya terus mengalami kenaikan menjadi Rp.420,8 milyar pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp.446,7 Milyar pada tahun 2011 dan terus naik menjadi Rp.475,7 milyar pada tahun 2012. Dengan adanya peningkatan ini, tentu saja menggambarkan secara absolut telah terjadi kenaikan nilai tambah dari tahun ke tahun. Tingkat kemajuan ekonomi Kota Padang Panjang juga meningkat seiring dengan tumbuhnya secara positif PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Konstan.

Peningkatan PDRB Kota Padang Panjang juga terlihat atas dasar harga berlaku. Peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh PDRB tersebut tahun 2012 tercatat sebesar Rp.1,1 Trilyun, naik dari tahun 2011 yang hanya Rp.1,04 Trilyun. Sedangkan tahun 2010 PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.918,9 Milyar dan tahun 2008 hanya sebesar Rp.809,8 Milyar. Perkembangan dan peningkatan PDRB tersebut dapat diartikan bahwa secara absolut PDRB Kota Padang Panjang tumbuh rata - rata sebesar 10,15%.

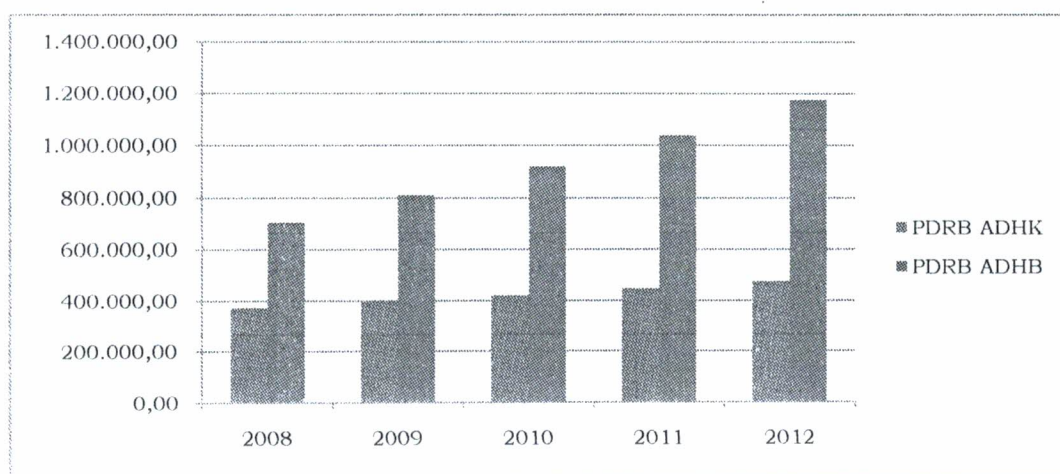
Adapun gambaran perkembangan PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 (ADHK dan ADHB) seperti terdapat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.2. berikut ini:

Tabel 2.8
PDRB ADHK dan ADHB serta perkembangannya
Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	
		Jumlah (x Rp. 1 juta)	Perkembangan (%)	Jumlah (x Rp. 1 juta)	Perkembangan (%)
1	2008	373.248,75	6,27%	706.290,94	13,44%
2	2009	396.828,98	6,32%	809.819,90	14,66%
3	2010	420.842,59	6,05%	918.962,99	13,48%
4	2011	446.700,28	6,14%	1.040.517,54	13,23%
5	2012	474.561,42	6,24%	1.175.852,81	13,01%

Sumber : BPS Kota Padang Panjang (data diolah)

Gambar 2.2
PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012



Sumber : BPS Kota Padang Panjang (data diolah)

Jika dilihat dari sektor ekonomi, seluruh kegiatan sektor perekonomian di Kota Padang Panjang berdasarkan harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup bervariasi. Sektor Jasa-jasa merupakan sektor ekonomi yang paling besar peningkatannya dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yaitu dari nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2010 sebesar 237,43 milyar rupiah menjadi sebesar 275,94 milyar rupiah pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 38,51 milyar rupiah.

Sektor lain yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Bangunan, dan Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, Sektor Industri dan Sektor Pertanian. Adapun gambaran perkembangan sektor perekonomian Kota Padang Panjang berdasarkan harga berlaku tahun 2008-2012 seperti terdapat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.9
Perkembangan Sektor Perekonomian PDRB Kota Padang Panjang
ADHB Tahun 2008-2012
(dalam milyar rupiah)

Lapangan Usaha	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	74,59	78,53	85,95	93,73	101,75
Pertambangan dan galian	2,38	2,58	2,70	2,81	2,95
Industri	62,19	69,23	77,19	85,45	93,83
Listrik & Air	20,52	21,65	23,35	24,49	26,16
Bangunan	61,06	71,33	84,13	97,29	110,95
Perdag, Hotel & Restoran	76,07	91,31	105,91	121,42	136,47
Angkutan & Komunikasi	160,01	182,01	206,62	232,70	256,61
Keu.Persewaan &Jasa Perush	75,21	85,06	95,70	106,69	120,78
Jasa-jasa	174,26	208,12	237,43	275,94	326,35
Jumlah	706,29	809,82	918,96	1.040,52	1.175,85

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Selanjutnya jika dilihat atas dasar harga konstan tahun 2000, berperannya Sektor Jasa-jasa terhadap perekonomian Kota Padang Panjang semakin dipertegas dengan tingginya peningkatan nilai tambah yang dicapai Sektor Jasa-jasa. Pada tahun 2010 nilai tambah Sektor Jasa-jasa mencapai 110,29 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2011 tercatat sebesar 118,19 milyar rupiah atau mengalami peningkatan nilai tambah sekitar 7,90 milyar rupiah. Tingginya peningkatan nilai tambah Sektor Jasa-jasa pada PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan tingginya produksi yang dihasilkan oleh Sektor Jasa-jasa. Meskipun demikian, Sektor Angkutan dan Komunikasi juga tetap menunjukkan sektor ekonomi yang tinggi peningkatan nilai tambahnya dibandingkan sektor ekonomi lainnya yaitu dari nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2010 sebesar 90,74 milyar rupiah menjadi sebesar 96,70 milyar rupiah atau mengalami peningkatan 5,96 milyar rupiah pada tahun 2011. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tahun sebelumnya 45,56 milyar menjadi 49,16 pada tahun 2011, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tahun sebelumnya sebesar 50,07 milyar rupiah menjadi sebesar 53,31 milyar rupiah pada tahun 2011, Sektor Bangunan tahun 2010 tercatat memiliki nilai tambah sebesar 32,19 milyar rupiah dan meningkat menjadi sebesar 34,38 milyar rupiah pada tahun 2011, Sektor Industri Pengolahan tahun 2010 tercatat memiliki nilai tambah sebesar 38,97 milyar rupiah dan meningkat menjadi sebesar 40,65 milyar rupiah pada tahun 2011.

Adapun gambaran perkembangan sektor ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012 berdasarkan harga konstan tahun 2000, dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan berikut ini:

Tabel 2.10
Perkembangan Sektor Ekonomi PDRB Kota Padang Panjang
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012
(dalam milyar rupiah)

Lapangan Usaha	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	38,97	40,15	40,74	41,65	42,73
Pertambangan dan galian	1,36	1,39	1,40	1,42	1,43
Industri	35,95	37,42	38,97	40,65	42,61
Listrik & Air	9,72	10,36	10,87	11,25	11,66
Bangunan	28,40	30,33	32,19	34,38	36,95
Perdag, Hotel & Restoran	43,99	47,15	50,07	53,32	56,79
Angkutan & Komunikasi	79,83	84,97	90,74	96,70	102,92
Keu.Persewaan & Jasa Perush	39,27	42,37	45,56	49,16	53,18
Jasa-jasa	95,75	102,70	110,29	118,19	126,29
Jumlah	373,25	396,83	420,84	446,70	474,56

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Adapun gambaran pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2008-2012 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang
Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	3,17	3,02	1,47	2,22	2,59
Pertambangan dan galian	2,25	1,79	1,13	1,03	0,70
Industri	3,60	4,11	4,14	4,30	4,82
Listrik & Air	5,19	6,56	4,95	3,47	3,64
Bangunan	6,45	6,80	6,16	6,79	7,48
Perdag, Hotel & Restoran	7,06	7,17	6,20	6,48	6,51
Angkutan & Komunikasi	7,78	6,44	6,78	6,58	6,43
Keu.Persewaan & Jasa Perush	7,13	7,88	7,54	7,90	8,18
Jasa-jasa	6,75	7,25	7,40	7,16	6,85
Jumlah	6,27	6,32	6,05	6,14	6,24

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Dilihat dari struktur perekonomian Kota Padang Panjang, terlihat bahwa pada tahun 2011, sektor ekonomi yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB adalah sektor Jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 26,52 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang tercatat sebesar 25,84 persen. Besarnya kontribusi sektor Jasa-jasa dalam struktur perekonomian Padang Panjang, terutama didukung oleh peran subsektor Pemerintahan Umum dan subsektor Swasta. tren ini masih terus berlanjut pada tahun 2012.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi pada tahun 2011 menempati urutan kedua dalam hal kontribusi yang diberikan pada pembentukan PDRB yaitu sebesar 22,36 persen padahal pada tahun 2010 nilai tambah sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 22,48 persen terhadap total PDRB Padang Panjang. Peranan sektor ini didukung oleh kontribusi dari masing-masing subsektor yang ada didalamnya, yaitu subsektor Pengangkutan dan subsektor Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 2011 diharapkan sektor ini mampu kembali meningkatkan peranannya dalam membentuk PDRB Kota Padang Panjang.

Tahun 2010 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan kontribusi sebesar 11,52persen dan menempati urutan ketiga dalam pembentukan PDRB.

Pada tahun 2011 ini kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam PDRB Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yaitu naik menjadi 11,67 persen. Besarnya peranan sektor ini didukung oleh kontribusi dari masing-masing subsektor yang ada didalamnya, yaitu sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan sub sektor Hotel dan Restoran. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2012.

Perkembangan kegiatan ekonomi di sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terus menunjukkan penurunan peran dalam struktur perekonomian Padang Panjang sejak tahun 2008. Sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 10,25persen. Dibandingkan dengan tahun 2010 kontribusi sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mengalami penurunan dimana pada tahun 2010 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 10,41 persen terhadap PDRB Kota Padang Panjang. Meskipun demikian sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar keempat pada PDRD Kota Padang Panjang.

Sektor Bangunan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup besar dengan memberikan kontribusi sebesar 9,35 persen pada PDRB, meningkat dari tahun 2010 yang mampu menyumbang 9,15 persen. Dengan demikian sektor ini menggeser Sektor Pertanian menjadi sektor kelima yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Padang Panjang.

Sektor Pertanian yang tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 9,35 persen dan pada tahun 2011 nilai tambah sektor Pertanian hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 9,01 persen terhadap total PDRB Kota Padang Panjang. Dengan demikian kontribusi sektor Pertanian terhadap perekonomian Kota Padang Panjang mengalami penurunan sebesar 0,34 persen. Tren ini diperkirakan masih terus berlanjut pada tahun 2012. Sedangkan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 8,21 persen pada PDRB, turun dari tahun 2010 yang mampu menyumbang 8,40 persen. Sehingga menempati urutan ke tujuh dalam kontribusi terhadap PDRB Kota Padang Panjang.

Sektor lain yang ada dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2011 yang memberikan kontribusi pada PDRB Kota Padang Panjang adalah Sektor Listrik dan Air Bersih dan Sektor Pertambangan dan Galian. Tahun 2010 kontribusi Sektor Listrik dan Air Bersih dan Sektor Pertambangan dan Galian masing-masing sebesar 2.35 persen dan 0.27 persen. Sementara pada tahun 2009 sektor-sektor tersebut menyumbang sebesar 2,54persen dan 0,29persen pada PDRB.

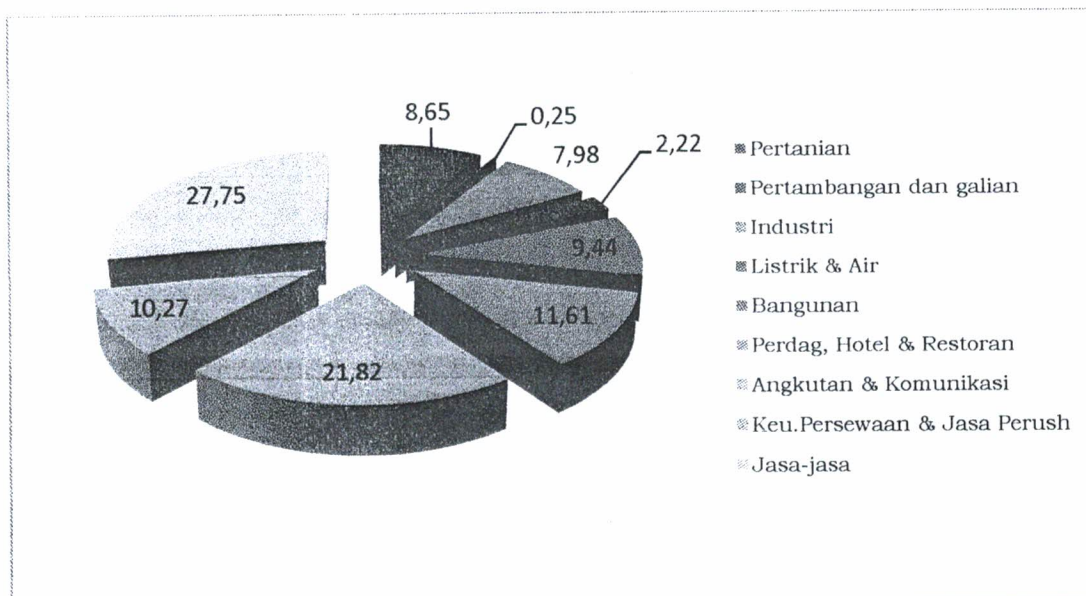
Perkembangan distribusi PDRB Kota Padang Panjang periode Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan gambar 2.4. berikut ini:

Tabel 2.12
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Panjang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	10,56	9,70	9,35	9,01	8,65
Pertambangan dan galian	0,34	0,32	0,29	0,27	0,25
Industri	8,80	8,55	8,40	8,21	7,98
Listrik & Air	2,91	2,67	2,54	2,35	2,22
Bangunan	8,64	8,81	9,15	9,35	9,44
Perdag, Hotel & Restoran	10,77	11,28	11,52	11,67	11,61
Angkutan & Komunikasi	22,66	22,48	22,48	22,36	21,82
Keu.Persewaan & Jasa Perush	10,65	10,50	10,41	10,25	10,27
Jasa-jasa	24,67	25,70	25,84	26,52	27,75
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Gambar 2.4
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Panjang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, data diolah

Dilihat dari PDRB perkapita yang merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi, maka perkembangan nilai PDRB perkapita penduduk Kota Padang Panjang secara umum sejak tahun 2008 sampai 2012 tetap menunjukkan terjadinya peningkatan. Berdasarkan atas harga berlaku, dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2009 PDRB perkapita Kota Padang Panjang adalah Rp.17.466.190,01,- meningkat dari tahun 2008 yang hanya sebesar Rp.15.466.112,07,-. Sedangkan Tahun 2012, PDRB perkapita Kota Padang Panjang meningkat menjadi Rp.24.401.868,00,-. Dengan kata lain selama 5 tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2012, terjadi peningkatan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kota Padang Panjang sebesar 57,78%.

Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan (PDRB Perkapita ADHK), dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2012 PDRB perkapita AHK Kota Padang Panjang adalah Rp.9.848.328,88 meningkat dari sebesar Rp.9.380.715,31 untuk tahun 2011. Tahun 2010, PDRB perkapita ADHK Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp.8.952.573,82, meningkat dari tahun 2008 yang hanya Rp.8.173.270,63, Apabila dirata - ratakan selama tahun 2008 sampai tahun 2012, maka akhir tahun 2012, terjadi peningkatan 20,49% dari tahun 2008. Berikut ini adalah tabel pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Padang Panjang Tahun 2008 sampai tahun 2012.

Tabel.2.13
PDRB Perkapita Kota Padang Panjang
Tahun 2008 – 2012

Tahun	PDRB Perkapita ADHB (Rupiah)	Kenaikan (%)	PDRB Perkapita AHK (Rupiah)	Kenaikan (%)
2008	15.466.112,07		8.173.270,63	
2009	17.466.190,01	12,93	8.558.804,07	4,72
2010	19.882.077,00	13,83	8.952.573,82	4,60
2011	22.191.039,00	11,61	9.380.715,31	4,78
2012	24.401.868,00	9,96	9.848.328,88	4,98

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013, data diolah

b. Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

1) Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu menurunkan tingkat kemiskinan selalu menjadi tujuan Pemerintah Kota Padang Panjang. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan meningkatnya pendapatan per kapita rakyat.

Sasaran penurunan angka kemiskinan diarahkan pada pengintegrasian setiap program dan kegiatan pemerintah. Dengan adanya integrasi program dan kegiatan tersebut, diharapkan dari tahun ke tahun masyarakat miskin Kota Padang Panjang dapat dikurangi. Secara umum, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang pada tahun 2012 adalah sebesar 6,5%, menurun dari tahun 2008 yang sebesar 8,27%. Walaupun 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, angka kemiskinan mengalami penurunan, namun angka kemiskinan tersebut masih di atas 6%. Berikut ini tabel angka kemiskinan Kota Padang Panjang dari tahun 2008 - 2012.

Tabel.2.14
Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang
Tahun 2008 - 2012

Tahun	Angka Kemiskinan (%)
2008	8,27
2009	7,58
2010	7,59
2011	7,25
2012	6,50

Sumber : Susenas Kota Padang Panjang, BPS 2008-2012

2) Angka Pengangguran

Secara umum, pengangguran dapat digambarkan sebagai sesuatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Pengangguran adalah permasalahan yang selalu muncul di banyak negara dan daerah. Begitupun halnya di Padang Panjang, pengangguran tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, sehingga banyak kebijakan dan program yang diluncurkan untuk mengurangi angka pengangguran.

Pengurangan angka pengangguran juga merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam RPJMD Tahun 2008 - 2013 guna mendukung misi mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat. Sesuai dengan kondisi yang ada, angka pengangguran dapat ditekan dari 8,08% pada tahun 2008 menjadi 7,37% pada tahun 2012. Berbagai program dan kegiatan yang berbasis masyarakat diluncurkan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Padang Panjang. Berikut ini tabel kondisi angka pengangguran di Kota Padang Panjang Tahun 2008 - 2012.

Tabel.2.15
Angka Pengangguran Kota Padang Panjang
Tahun 2008 - 2012

Tahun	Angka Pengangguran (%)
2008	8,08
2009	10,01
2010	9,75
2011	8,56
2012	7,37

Sumber : Sakernas Kota Padang Panjang, BPS 2008-2012

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial antara lain dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disampaikan gambaran perkembangan beberapa indikator tersebut antara lain :

a. Angka Melek Huruf

Dilihat bahwa Angka Melek Huruf di Kota Padang Panjang, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan dan dapat dikatakan sudah cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Angka melek huruf di Kota Padang Panjang pada tahun 2008 sebesar 99,28 % naik menjadi 99,31%. Tahun 2011 dan terus meningkat menjadi 99,32 tahun 2012. Ini mengindikasikan hanya 0,68% penduduk yang tidak bisa membaca huruf latin. Indeks ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi yang hanya sebesar 97,23% tahun 2012. Adapun gambaran perkembangan melek huruf Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008-2012

Nama Daerah	Angka Melek Huruf (persen)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Padang Panjang	99,28	99,29	99,30	99,31	99,32
Sumatera Barat	96,60	96,81	97,09	97,16	97,23

Sumber : Publikasi BPS

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah setidaknya menunjukkan bawa rata-rata lama penduduk suatu daerah mengikuti pendidikan. Dalam konteks ini dapat diamati bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Padang Panjang mengikuti pendidikan terus meningkat, yakni 10,20 tahun pada tahun 2008 naik menjadi 10,73 tahun pada tahun 2012. Ini berarti, rata-rata penduduk Kota Padang Panjang mengikuti pendidikan selama lebih kurang 10,74 tahun. Angka ini di atas rata-rata lama sekolah provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 8,60 tahun pada tahun 2012. Sebagai gambaran perkembangan angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012

Nama Daerah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Padang Panjang	10,20	10,22	10,23	10,73	10,74
Sumatera Barat	8,26	8,45	8,48	8,57	8,60

Sumber : Publikasi BPS

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing jenjang pendidikan.

APK Kota Padang Panjang secara umum sudah diatas 100% dan ada kecenderungan mengalami peningkatan. Tahun 2012, APK jenjang SD Kota Padang Panjang adalah sebesar 121,09%, meningkat dari tahun 2009 yang hanya 104,93%. Berikut gambaran perkembangan APK Kota Padang Panjang dari tahun 2009 - 2012 sebagai berikut:

Tabel.2.18
APK Kota Padang Panjang Tahun 2009 - 2012

Jenjang Pendidikan	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
SD	104,93	101,05	121,09	121,09
SLTP	138,86	141,36	134,12	134,12
SLTA	214,81	225,04	240,31	240,31

Sumber : Profil Pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2010-2013,
Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas, dapat disampaikan bahwa tahun 2012 untuk jenjang SD,SLTP dan SLTA, APK Kota Padang Panjang sudah diatas 100%. Bahkan untuk SLTA, APK Kota Padang Panjang sudah diatas 200%. Kondisi mencerminkan bahwa secara umum penduduk Kota Padang Panjang yang berusia sekolah, sudah menikmati bangku pendidikan.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan antara APK dengan APM, maka APM sebagai indikator daya serap yang lebih baik dari APK, karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Memahami angka partisipasi dalam pendidikan tentu sangat penting bagi semua pihak. Sebab dengan mengetahui angka partisipasi maka kita akan mengetahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai. Dengan angka partisipasi kita dapat mengetahui pada karakter atau variabel apa saja, ketidakmerataan atau kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan itu terjadi. APM Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2012, APM jenjang SD Kota Padang Panjang adalah sebesar

110,43%, meningkat dari tahun 2009 yang hanya 92,05%. Dengan demikian, secara umum tahun 2012, semua penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki usia pendidikan SD, sudah menikmati bangku sekolah. Adapun gambaran perkembangan APM Kota Padang Panjang dari tahun 2009 - 2012 yaitu sebagai berikut:

Tabel.2.19
APM Kota Padang Panjang Tahun 2009 - 2012

Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
SD	92,05%	87,48%	110,43%	110,43%
SLTP	93,15%	104,89%	96,12%	96,12%
SLTA	123,22%	156,61%	122,3%	122,3%

*Sumber : Profil Pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2010-2013
Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tahun 2012 untuk jenjang SD dan SLTA, APM Kota Padang Panjang sudah diatas 100%. Sedangkan untuk SLTP masih 96,12%. Dengan demikian untuk tingkat SLTP, masih ada 3,88% penduduk Kota Padang Panjang, tidak bersekolah pada bangku sekolah SLTP. Namun demikian, diharapkan tahun 2013, APM tingkat SLTP sudah 100%.

e. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka Usia Harapan Hidup pada suatu umur X adalah rata - rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Selanjutnya, semakin meningkat kesejahteraan masyarakat dan status sosial masyarakat, juga berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup atau usia masyarakat. Berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang, dimana pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan angka usia harapan hidup masyarakat. Pada tahun 2009 angka harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang 70,60 tahun, naik menjadi 71,47 tahun pada tahun 2010, kemudian terus meningkat menjadi 71,73 tahun pada tahun 2011 dan 72,01 tahun Pada tahun 2012. Capaian angka usia harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang lebih baik dari angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat. Gambaran perkembangan angka usia harapan hidup masyarakat Padang Panjang seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Angka Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012

Nama Daerah	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Padang Panjang	70,60	70,60	71,47	71,73	72,01
Sumatera Barat	69,00	69,26	69,50	69,55	70,02

Sumber : Publikasi BPS

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran aspek pelayanan umum di Kota Padang Panjang dapat diuraikan atas focus pelayanan urusan wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.

Dalam kaitan ini, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang memang harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Urusan Pilihan meliputi Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berikut ini disampaikan hasil gambaran pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka pembangunan bidang pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Kota Padang Panjang. Pelaksanaan urusan pendidikan di Kota Padang Panjang, secara umum dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan didukung oleh beberapa SKPD terkait lainnya.

Beberapa gambaran pelaksanaan pembangunan urusan pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan seperti APM, APK, dan Rata-rata Lama Bersekolah sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya. Berikut akan dikemukakan

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 12 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam melayani penduduk usia sekolah sebagai berikut: Adapun ketersediaan sarana sekolah dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.21
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2008 - 2012 Kota Padang Panjang

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	39	39	39	39	39
1.2.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	6443	6679	6679	7003	5907
1.3.	Rasio	0.61	0.58	0.58	0.56	0.66
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	17	17	17	17	17
2.2.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	3351	3469	3595	3459	3690
2.3.	Rasio	0.51	0.49	0.47	0.49	0.46
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	20	20	20	20	20
3.2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	3402	3521	4281	3453	3040
3.3.	Rasio	0.55	0.57	0.47	0.58	0.66

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2009-2013 (data diolah)

b. Rasio Guru/Murid

Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai tenaga pengajar merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Rasio Guru dan Murid Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	425	432	496	494	529
1.2.	Jumlah Murid (orang)	6645	6738	6880	6956	7105
1.3.	Rasio (%)	6.40	6.42	7.21	7.10	7.45
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru (orang)	516	541	554	550	573
2.2.	Jumlah Murid (orang)	4271	4357	4641	4809	4978
2.3.	Rasio (%)	12.08	12.42	11.94	11.44	11.51
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah Guru (orang)	711	748	778	775	799
3.2.	Jumlah Murid (orang)	5766	6071	6060	6176	6693
3.3.	Rasio (%)	12.33	12.32	12.84	12.55	11.94

Sumber : Padang Panjang Dalam angka 2009-2013 (data diolah)

c. Angka Melek Huruf dan Putus Sekolah

Angka melek huruf setidaknya menunjukkan seberapa besar penduduk Kota Padang Panjang yang mampu membaca huruf latin, sedangkan angka putus sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Berdasarkan data yang ada, maka angka melek huruf dan angka putus sekolah di Kota Padang Panjang periode 2008-2012 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan
Kota Padang Panjang Tahun 2008 - 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Melek Huruf (%)	99,28	99,29	99,30	99,31	99,31
Angka Putus Sekolah					
SD (%)	0,14	0,08	0,05	0,21	0,39
SLTP (%)	0,21	0,23	0,17	0,19	0,25
SLTA (%)	0,26	0,32	2,41	1,13	0,95

Sumber : BPS, dan Profil Pendidikan Kota Padang Panjang

Tabel di atas menunjukkan perkembangan rata-rata angka melek huruf Kota Padang Panjang sudah tinggi yaitu dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 99,28 tahun 2008 menjadi 99,31 tahun 2012.

Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP kembali menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010. Angka Putus Sekolah tingkat SD tahun 2011 naik sebesar 0,16 persen menjadi 0,21 persen. Angka Putus Sekolah tingkat SLTP tahun 2011 naik sebesar 0,02 persen menjadi 0,19 persen. Sementara itu Angka Putus Sekolah tingkat SLTA turun sebesar 1,28 persen menjadi 1,13 persen pada tahun 2011.

d. Angka Kelulusan

Untuk melihat keberhasilan proses belajar dan mengajar juga dapat dilihat dari angka kelulusan yang menggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan. Secara umum angka kelulusan sekolah di Kota Padang Panjang secara flutuatif terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya pada berbagai jenjang pendidikan. Adapun gambaran perkembangan angka kelulusan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Peserta UN (Orang)	937	981	1003	1016	996
1.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	937	981	1003	1016	996
1.3.	Persentase Lulusan	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs					
2.1.	Peserta UN (Orang)	1618	1308	1515	1496	1438
2.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	1335	1139	1295	1426	1399
2.3.	Persentase Lulusan	82.51	87.08	85.48	95.32	97.29
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Peserta UN (Orang)	1762	1875	1875	1785	1871
3.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	1526	1704	1740	1683	1853
3.3.	Persentase Lulusan	86.61	90.80	92.80	94.29	99.04

Sumber : Dinas Pendidikan (data diolah)

e. Perkembangan Perguruan Tinggi

Di Kota Padang Panjang telah berkembang beberapa Perguruan Tinggi. Tabel berikut menggambarkan kondisi perguruan tinggi di Kota Padang Panjang, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang

No	Uraian	Jumlah dan Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Perguruan Tinggi	5	5	5	5	5
2	Jumlah Pengajar	390	370	418	431	431
3	Jumlah Mahasiswa	1.572	1.761	2.177	2.231	2.425
4	Jumlah Lulusan	268	234	212	240	307

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2009-2013

Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat di Kota Padang Panjang (multiplier effect) baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

f. Perkembangan Sekolah Agama

Keberadaan dan perkembangan Sekolah Agama yang cukup banyak direpresentasikan oleh Pondok Pesantren di Kota Padang Panjang, tidak terlepas dari kesejarahan kota yang berjuduk Kota Serambi Mekah. Berbagai sekolah agama yang ada di Kota Padang Panjang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Kelas di Lingkungan Departemen Agama di Kota Padang Panjang Tahun 2012

No	Nama Sekolah	Kelas	Murid	Guru
I	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	27	705	49
1	MIS Rahmah El Yunisiyah	12	315	25
2	MIS Thawalib/MIUT	-15	390	24
II	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	55	1474	174
1	MTs Negeri	25	789	56
2	MTs Thawalib Putra	5	130	23
3	MTs Thawalib Putri	3	58	20
4	MTs Muhammadiyah	6	155	21
5	MTs Thawalib Gunung	4	73	17
6	MTs DMP Diniyyah Putri	12	269	37
III	Madrasah Aliyah (MA)	78	1907	297
1	MAN Koto Baru	29	965	84
2	MAN Gunung	13	326	34
3	MAN Balai-Balai	9	205	36
4	MAS KUI Thawalib Putra	3	44	22
5	MAS KUI Thawalib Putri	2	12	21
6	MAS KMI Diniyyah Putri	10	165	38
7	MAS KUL Muhammadiyah	9	150	41
8	MAS Serambi Mekah	3	40	21
	Total	160	4086	520

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

Sama halnya dengan keberadaan, perguruan tinggi, maka keberadaan sekolah agama juga sangat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Padang Panjang, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun dari aspek perkembangan kehidupan keagamaan, khususnya perkembangan pendidikan agama Islam.

2. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan dan pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang sudah menjadi perhatian, bahkan menjadi program strategis. Sepanjang tahun 2008 - 2012 akses dan pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang sudah baik dan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, sehingga telah memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap peningkatan angka harapan hidup dan IPM Kota Padang Panjang. Beberapa capaian indikator umum pada pelayanan kesehatan sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Berikut ini juga disampaikan gambaran capaian indikator kesehatan lainnya :

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Kesehatan,
Kota Padang Panjang Tahun 2008 s.d 2012

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	14,08	8,70	5,67	7,22	6,38
Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	23,47	3,87	1,89	1,03	1,06
Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 1000 KH)	0	0	0,94	0	0
Prevalensi Balita Kurang Gizi (%)	10,00	6,70	6,40	6,23	6,20

Sumber. : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang,
BPS Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa angka kematian bayi tahun 2012 sebesar 6,38 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini sudah menurun dari tahun 2011 yang mencapai 7,22 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu angka prevalensi bayi kurang gizi sudah berhasil ditekan menjadi 6,20 persen pada tahun 2012. Capaian ini sedikit menurun yaitu 3,8 persen pada tahun 2008. Sedangkan untuk angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup juga berhasil ditekan dari 23,47 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 1,06 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan sepanjang tahun 2008-2012 hanya terdapat kasus 1 orang pada tahun 2010. Angka prevalensi gizi buruk setiap tahunnya terus menunjukkan penurunan sehingga pada tahun 2012 hanya mencapai 6,20 %

Selanjutnya secara spesifik beberapa capaian program pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang antara lain :

a. Terwujudnya RSUD Terakreditasi

Bagian dari indikator pencapaian misi Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Berstandar Internasional adalah terwujudnya RSUD yang terakreditasi pada tahun 2013. RSUD Kota Padang Panjang adalah salah satu unit pelayanan kesehatan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tahun 2012, telah tercapai 5 akreditasi pelayanan dasar pada RSUD.

b. Peningkatan Peralatan Kedokteran dan Sarana Penunjang Lainnya

Secara umum peningkatan peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya pada RSUD, dilihat dari indikator ketersediaan peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya. Tahun 2012 ditargetkan indikator ini adalah 91,67% dan hal ini dapat dicapai. Tercapainya target ini juga tidak dapat dilepaskan dari adanya bantuan pengadaan alat - alat kesehatan yang diterima oleh RSUD dari Kementerian Kesehatan serta dana percepatan

pembangunan infrastruktur daerah tahun 2011. Tahun 2012 juga dilaksanakan pengadaan mobiler dan perlengkapan rumah tangga RSUD.

c. Tersedianya Obat Esensial Dan Non Esensial di RSUD Kota Padang Panjang

Untuk indikator tersedianya obat esensial dan non esensial di RSUD Kota Padang Panjang, secara umum tahun 2012 sudah mencapai 100%. Dengan demikian pasien yang berobat pada RSUD dapat dilayani dengan baik, khususnya pelayanan di bidang pengadaan obat esensial dan non esensial. Ketersediaan obat di RSUD Kota Padang Panjang secara umum untuk seluruh unit atau ruangan rawat inap, baik pelayanan umum maupun spesialisik sudah tersedia 100% pada tahun 2012.

d. Penciptaan Lingkungan Sehat

Upaya penciptaan lingkungan sehat terus menunjukkan peningkatan dengan terus berkembangnya akses sanitasi layak sudah mencapai 78,74 persen pada tahun 2011, naik 12 persen lebih dari tahun 2010. Peningkatan akses air minum layak juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai angka 86,12 persen. Hal ini sangat erat kaitannya dengan penambahan jumlah rumah tangga pelanggan air minum yang mencapai 5288 rumah tangga pada tahun 2011. Adapun gambaran perkembangan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.28
Lingkungan Sehat Kota Padang Panjang
Tahun 2008 s.d 2012

Uraian	Padang Panjang				
	2008	2009	2010	2011	2012
Akses Sanitasi Layak (%)	64,76	65,72	66,40	66,8	67,5
Akses Air Minum Layak (%)	60	78	85,21	86,12	90,00
Banyaknya rumah tangga pelanggan air minum PDAM	4890	4960	5181	5288	5740

Sumber :Dinas Kesehatan, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2009-2013

e. Pengendalian Penyakit di Tengah Masyarakat

1) Kasus penyakit menular yang tertangani

Sebagai kota yang terletak dipersimpangan, Padang Panjang tidak luput dari kejadian penyakit menular seperti TBC, Demam Berdarah, Diare dan penyakit menular lainnya. Kasus ini timbul karena adanya pengaruh lingkungan, pola hidup masyarakat, perubahan iklim perubahan vektor panyakit. Tahun 2012, 99% kasus penyakit menular di masyarakat Kota Padang Panjang sudah tertangani dengan baik dan cepat. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyemprotan/*fogging* nyamuk, peningkatan *surveillance*, epidemiologi dan edukasi pencegahan pemberantasan, penularan penyakit endemik/epidemik.

2) Deteksi dini penyakit tidak menular pada masyarakat

Dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, terjadi pula perubahan gaya hidup, pola hidup dan mobilisasi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kecenderungan peningkatan kajadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, borak dan penyakit lainnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini, tahun 2012 telah dioperasionalkan sebanyak 22 posbindu.

Dari uraian yang telah dikemukakan, khususnya untuk bidang pelayanan kesehatan, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun senantiasa berusaha meningkatkan kualitas

pelayanan. Hal ini terlihat dari usaha peningkatan pengembangan perilaku hidup sehat di tengah - tengah masyarakat melalui kegiatan *promosi, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif*, ketersediaan air bersih, jamban keluarga dan asumsi kesehatan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan angka penderita penyakit menular dan tidak menular di Kota Padang Panjang semakin menurun yang akhirnya angka harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang dapat semakin meningkat.

Seterusnya, untuk cakupan pelayanan kesehatan sampai tahun 2012, angkanya mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh masyarakat Kota Padang Panjang sudah terlayani dibidang kesehatan melalui berbagai program seperti Jamkesmas, Jamkesda, JPKM-PP dan lain - lain. Kesehatan merupakan faktor penting yang sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kota Padang Panjang. Keberhasilan pencapaian indikator sebagaimana yang dikemukakan tersebut didukung oleh keberadaan sarana pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis, para medis dan tenaga lainnya. Berikut ini gambaran perkembangan sarana pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2010 - 2012 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.2.29
Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Padang Panjang
Tahun 2010 - 2012

Sarana Kesehatan	Tahun		
	2010	2011	2012
Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1
Rumah Sakit Swasta (RSI. Ibnu Sina)	1	1	1
Poliklinik	3	3	3
Puskesmas	3	4	4
Puskesmas Pembantu	7	7	7
Balai Pengobatan	-	-	-
Tempat Praktek Dokter	34	34	34
Pos Kesehatan Kelurahan	16	16	16
Apotik	7	7	7
Toko Obat	6	6	6

Sumber : LKPJ AMJ Walikota Padang Panjang Tahun 2008-2013

Adapun gambaran perkembangan tenaga pelayanan kesehatan seperti tenaga medis, para medis dan tenaga lainnya di Kota Padang Panjang Tahun 2012, termasuk pada pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah daerah seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.30
Jumlah Tenaga Medis, Para Medis dan Tenaga Lainnya pada
Pelayanan Kesehatan Tahun 2012

Jabatan	RS. Umum Daerah	RS. Swasta (RSI.Yarsi)	Puskesmas
Dokter Spesialis	12	7	-
Dokter Umum	5	3	12
Dokter Gigi	3	1	4
Apoteker	5	1	-
Perawat	118	34	38
Pranata Laboratorium Kesehatan	10	-	8
Psikolog	1	-	-
Sanitarian	6	-	1
Nutrisionis	7	1	7
Radiografer	5	1	-
Perekam Medis	12	2	7
Teknisi Elektromedis	3	-	-
Fisioterapi	4	-	-
Bidan	19	3	22
Perawat Gigi	4	1	4
Asisten Apoteker	22	6	5
Lain-Lain	44	29	11
Jumlah	280	89	118

Sumber : LKPJ AMJ Walikota Padang Panjang Tahun 2008-2013

3. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum sebagian sudah diuraikan dalam urusan kesehatan di antaranya akses sanitasi layak dan akses air minum layak. Selanjutnya beberapa indikator payanan urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2011-2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Panjang jalan menurut status jalan:	93.40	94.67	94.67	94.67	94.86
	- Negara	11.60	12.67	12.67	12.67	11.14
	- Propinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Kota	81.80	82.00	82.00	82.00	83.72
2	Panjang jalan menurut kondisi jalan:	93.40	94.67	94.67	94.67	94.86
	- Baik	61,27	61.74	64.19	71.04	79.38
	- Sedang	10.69	10.69	9.94	6.86	4.53
	- Rusak	1.86	1.86	1.86	2.09	3.50
	- Rusak berat	20.58	20.38	18.68	18.45	7.45
3	Panjang jalan menurut jenis jalan:	93.40	94.67	94.67	94.67	94.86
	- Aspal	79,72	80.99	81.74	81.74	86.07
	- Kerikil	4.18	4.18	3.68	3.91	1.21
	- Tanah	9.50	9.50	9.25	9.02	7.58

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2009-2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jalan di Kota Padang Panjang secara keseluruhan pada tahun 2012 adalah sepanjang 94,86 km yang terdiri atas 11,14 km jalan Negara dan 83,72 km jalan kota. Sedangkan menurut kondisi jalan terlihat bahwa 79,38 km jalan berada dalam kondisi baik, 4,53 km sedang, 3,50 km rusak dan 7,45 km rusak berat. Ditinjau dari jenis jalan terlihat bahwa 86,07 km jalan aspal, 1,21 km jalan kerikil dan 7,58 km jalan tanah. Di samping itu urusan pekerjaan umum juga mendukung pembangunan urusan lainnya, khusus dalam hal bersifat teknis bangunan fisik prasarana.

4. Perumahan dan Pemukiman

Pada urusan perumahan ini selama kurun waktu 2008 - 2012, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk mendorong pembangunan perumahan melalui pengembang, sedangkan aspek penataan lingkungan dan kawasan kumuh, termasuk pengembangan kasiba/lisiba perlu ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dirasakan telah cukup mampu untuk mendorong penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba masih cukup rendah sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan.

Pembangunan perumahan dan permukiman juga menitikberatkan pada sarana dan prasarana lingkungan, yang dilakukan melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, rehab rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi lingkungan berupa MCK plus, septiktank komunal dan prasarana persampahan serta peningkatan layanan air bersih melalui PDAM.

5. Penataan Ruang

Pola dan pemanfaatan ruang merupakan hal yang strategis dalam pengembangan kota, termasuk Kota Padang Panjang. Dalam kaitan ini Kota Padang Panjang telah berhasil menetapkan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032. Peruntukan setiap ruang di Kota Padang Panjang harus ditata dengan rapi agar kota tidak menjadi semrawut. Beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

- a. peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
- f. perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- i. perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut telah ditetapkan pola dan pemanfaatan ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana kawasan lindung dengan luas lebih kurang 1.459,9 Ha (49,10%) ; dan rencana kawasan budi daya dengan luas lebih kurang 1.521,64 Ha (50,90%). Rencana kawasan lindung terdiri atas : kawasan perlindungan setempat; kawasan hutan lindung dan penyangga hutan lindung; kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan ruang terbuka hijau kota.

Sedangkan rencana kawasan budi daya di Kota Padang Panjang terdiri atas : kawasan peruntukan perumahan; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukan perkantoran; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; ruang terbuka non hijau; ruang evakuasi bencana; kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan kawasan peruntukan pelayanan umum.

Secara teknis masing-masing kawasan tersebut di atas telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kota Padang Panjang tahun 2012-2032.

6. Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*), dengan pendekatan perencanaan yaitu : Politik; Teknokratik; Partisipatif; Atas bawah (*top-down*); dan Bawah atas (*bottom-up*). Sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni, Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana dan Evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Beberapa produk perencanaan umum pembangunan Kota Padang Panjang dalam mendukung percepatan pembangunan, antara lain RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS.

7. Perhubungan

Salah satu yang menentukan lancarnya perekonomian suatu kota adalah kondisi arus barang dan orang yang akan didistribusikan dari daerah sumber daya ke lokasi – lokasi pusat perekonomian. Kondisi perhubungan di Kota Padang Panjang dapat terlihat dari :

- a. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang dilayani melalui terminal angkutan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebanyak

1.090.320 orang, tahun 2011 sebanyak 1.106.084 orang dan pada tahun 2012 naik menjadi 1.080.110 orang.

b. Perkembangan kendaraan bermotor

Perkembangan kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang cukup pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor tercatat 14.533 unit, naik menjadi 15.958 unit tahun 2010, naik menjadi 17.465 unit tahun 2011 dan 18.119 tahun 2012.

c. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Jumlah uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor baik yang dibuat dan atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pada tahun 2010 jumlah uji kir angkutan umum sebanyak 317 kendaraan, turun menjadi 290 kendaraan tahun 2011 dan menjadi 273 tahun 2012.

8. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan.

Setiap aktifitas kehidupan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan hidup termasuk diantaranya adalah timbulnya dampak pencemaran baik udara, air maupun tanah. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu isu yang sangat krusial karena salah satu tujuan pembangunan adalah perbaikan lingkungan. Secara umum kualitas udara, debu dan kebisingan Kota Padang Panjang masih di bawah baku mutu. Sumber pencemaran antara lain berasal dari aktifitas rumah tangga (sumber domestik), fasilitas umum, pembakaran sampah, sumber yang bergerak seperti transportasi serta dari pertanian dalam arti yang luas. Beberapa program dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sudah dilaksanakan antara lain pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, pengelolaan sampah dan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.

9. Pertanahan

Sesuai dengan ketentuan berlaku, maka pada urusan pertanahan yang dilakukan adalah pelayanan pertanahan seperti pelayanan hak atas tanah, penyelesaian sengketa pertanahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh BPN Kota Padang Panjang.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir antara lain yaitu keterbatasan lahan yang cocok untuk pembangunan, keterbatasan dana untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sering ditemuinya ketidakcocokan penetapan besaran ganti rugi tanah dengan pemilik tanah, sulitnya memperoleh kelengkapan data seperti bukti atas hak sehingga menghambat proses pengurusan sertifikat dan belum tersedianya sistem informasi pertanahan tentang persil tanah (status tanah, luasan, penggunaan lahan dan *zoning site*) sehingga memperlambat pengambilan keputusan.

Khusus penyelenggaraan urusan pertanahan oleh Pemko Padang Panjang, selain menyelesaikan persoalan pertanahan juga dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan selama tahun 2008-2012 antara lain seperti:

- a) Pengadaan Tanah Lanjutan Pembangunan SMU Super Unggul Provinsi Sumbar di Kelurahan Ganting dan Kelurahan Sigando
- b) Pengadaan Tanah Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Gajah Tanang Kelurahan Ekor Lubuk

- c) Pengadaan Tanah Pengembangan Pasar Sayur/Los Sayur di Terminal Bukit Surungan
- d) Penggantian Tanah Masyarakat yang Terkena Pelebaran di Jalan H. Miskin Gajah Tanang
- e) Pengadaan tanah Jalan 2 Jalur di MTsN Bukit Surungan
- f) Penggantian Tanah yang terkena Pelebaran Gelanggang Pacuan Kuda Bancah Laweh di Kelurahan Koto Panjang
- g) Pengadaan Tanah Balai Benih Ikan
- h) Pengadaan Tanah Perluasan MTsN Ganting
- i) Penggantian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena pelebaran jalan di RT.5 Kelurahan Silaing Bawah
- j) Pengadaan Tanah untuk lokasi Puskesmas Terpadu di Kelurahan Bukit Surungan
- k) Pengadaan Tanah dan Penggantian Bangunan untuk Jalan Layang Simpang 8 dari arah Terminal Bukit Surungan ke arah Kacang Kayu
- l) Pengadaan Tanah untuk Lokasi Sentra Industri Kulit
- m) Pengadaan Tanah untuk Lokasi Kantor Lurah Sigando
- n) Pengadaan Tanah untuk Lokasi Kantor Lurah Guguk Malintang
- o) Pengadaan Tanah untuk Perluasan Lokasi Industri Kulit di Kel.Silaing Bawah
- p) Pengadaan Tanah Lokasi MAN 3 di Kelurahan Kampung Manggis
- q) Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Perumahan Pemda di Kelurahan Ngalau
- r) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan MTsN 2 di Kelurahan Ngalau
- s) Pengadaan Tanah untuk Jalan Kamarullah di Kelurahan Bukit Surungan
- t) Pengadaan Tanah Lokasi Kantor Lurah Silaing Bawah
- u) Pengadaan Tanah Lanjutan Jalan Layang Simpang 8
- v) Pembebasan Tanah Jalan Rao - Rao Koto Katik
- w) Pembebasan Tanah RT.19, RT.20 dan RT.21 di Kelurahan Balai - Balai
- x) Pembebasan Tanah untuk Jalan Simpang 8 Arah Timur
- y) Pembebasan Tanah untuk Lanjutan Jalan Samping Rumah Delfian
- z) Pengadaan Tanah untuk lanjutan pembuatan jalan di RT.19, RT.20 dan RT.21 di Kelurahan Balai - Balai.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan program peningkatan administrasi kependudukan yang baik dan terkonsep mempunyai peranan yang sangat strategis bagi perkembangan pembangunan kependudukan dimasa datang. Database yang lengkap dan akurat akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil daerah yang meliputi pendaftaran/pencatatan kependudukan dan pelayanan umum. Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2009 sampai dengan 2012 membawa dampak meningkatnya penerbitan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil seperti terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.32
Penerbitan Dokumen dan Akta pada tahun 2009-2012
Kota Padang Panjang

No	Uraian	2009 (Lembar)	2010 (Lembar)	2011 (Lembar)	2012 (Lembar)
1.	Akta Kelahiran	3100	2079	2379	1911
2.	Akta Kematian	3	5	5	6
3.	Akta Perkawinan	10	13	2	5
4.	Akta Perceraian				
5.	Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak	1	0	0	1
6.	Akta Ganti Nama	0	1	4	0

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah pembangunan yang dirumuskan dalam inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan jelas menempatkan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan yang terimplementasikan dalam program dan strategi pembangunan ditingkat Kabupaten dan Kota, dimana dikuatkan dan dipertegas kembali dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan dengan pendekatan Gender merupakan pendekatan pembangunan yang saat ini digunakan oleh Indonesia dan terumuskan dalam kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan hukum dan teknis. Pendekatan Pembangunan ini dalam implementasinya menekankan kepada proses penyusunan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peranan laki-laki dan perempuan didalamnya, serta memperhatikan akses, manfaat dan dampak pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan.

Pendekatan pembangunan Gender and Development tidak hanya dilihat dalam arti peningkatan akses pada sumber daya dan perbaikan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menyangkut proses bagaimana manfaat pembangunan tersebut diperoleh. Artinya bagaimana akses, manfaat, kontrol dan dampak pembangunan dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan, aspirasi dan kepentingannya.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008-2012 dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang. Program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan urusan ini telah dilaksanakan antara lain :

- a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan

Pada Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan dilaksanakan dalam 1 kegiatan dengan hasil terlaksananya penyuluhan terhadap 40 orang ibu rumah tangga yang tergolong keluarga miskin.

b. Program Keluarga Berencana

Pada Program Keluarga Berencana, dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain :

1. Orientasi bagi 90 orang tenaga pendata keluarga dan tersedianya database keluarga yang akurat dan dinamis untuk perencanaan operasional program KB di lapangan
2. Pembinaan terhadap 10.000 Kepala Keluarga mulai dari orientasi kader pendata sebanyak 90 orang sampai ke sarasehan tingkat Kelurahan sebanyak 400 orang dan tingkat Kecamatan sebanyak 50 orang
3. Penilaian kader, pembinaan terhadap peserta KB yang telah ada, keikutsertaan dalam berbagai perlombaan baik tingkat pusat maupun provinsi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait berkenaan dengan peningkatan peserta KB baru
4. Pelayanan serentak terhadap rapat kesepakatan TMKK dan Bhakti IBI, Penilaian terhadap kader dan dibayarkannya honor kader sebanyak 524 orang dan terlaksananya jambore IMP, PLKB dan PKK di tingkat Provinsi
5. Pengadaan 1 unit mobil pelayanan KB, 8 unit sepeda motor, 14 unit *Obgin Bad*, 22 set *Implant Kit*, 51 set BKB Kit, 1 unit laptop, 8 set IUD kit, 16 set KIE Kit, 8 set sarana kerja PLKB, 4 perangkat komputer/PC dan 2 unit *address public*.
6. KRR bagi pendidik sebaya dan konselor sebaya untuk kelompok PIK KRR setingkat SLTA se Kota Padang Panjang dengan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari konselor sebaya dan pendidik sebaya pada kelompok PIK Remaja yang ada di Kota Padang Panjang. Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/terwujudnya data basis Program KB Nasional mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Padang Panjang
7. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu di Kota Padang Panjang dengan peserta 160 orang yang terdiri dari pengurus TP-PKK Kota Padang Panjang, Ketua TP-PKK Kecamatan se Kota Padang Panjang, Pengurus Persit, Pengurus Bhayangkari, Kader BKR dan PPKBD Kota Padang Panjang, mubaligh dan tokoh agama se Kota Padang Panjang.
8. Pembinaan Keluarga Berencana di Kota Padang Panjang berupa pencapaian jumlah peserta KB baru dari target sebanyak 4.928 *akseptor dan* pencapaian peserta KB aktif sebanyak 7.392 Akseptor.

c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pada Program Kesehatan Reproduksi Remaja dilaksanakan kegiatan :

1. Orientasi bagi 150 orang masyarakat, 310 orang dari tingkat SLTA dan anggota Pramuka Saka Kencana sehingga memiliki pengetahuan dibidang reproduksi remaja, HIV/AIDS, bahaya Narkoba, orientasi bagi 60 orang kader BKB, keikutsertaan 13 orang peserta Jambore kesehatan reproduksi di Jambi, temu kader sebanyak 230 peserta, dan pengadaan 20 unit alat permainan Edukatif bagi kelompok BKB percontohan
2. Kegiatan KRR bagi pendidik sebaya dan konselor sebaya untuk kelompok PIK KRR setingkat SLTA se Kota Padang Panjang dengan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari konselor sebaya dan pendidik sebaya pada kelompok PIK Remaja yang ada di Kota Padang Panjang 50 orang yang terdiri dari anggota Kelompok PIK Remaja Jalur Sekolah se Kota Padang Panjang 60 orang dari TOGA dan TOMA se Kota Padang Panjang

3. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) berupa Jambore PIK Remaja selama 3 hari dengan peserta sebanyak 19 orang yang terdiri dari PIK-Remaja Kota Padang Panjang
- d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KS yang Mandiri

Pada Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KS yang Mandiri dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain :

1. Peringatan HARGANAS baik tingkat Pusat dan Provinsi serta tersedianya Buku Profil UPPKS sebanyak 65 buah, magang 30 orang pengurus kelompok UPPKS ke Kota Payakumbuh serta Bintek terhadap 26 kelompok UPPKS.
 2. Orientasi manajemen bagi pengurus kelompok UPPKS se Kota Padang Panjang dengan peserta sebanyak 20 orang dan kunjungan lapangan ke Kelompok UPPKS terbaik tingkat Nasional. Orientasi peningkatan ekonomi untuk pengurus kelompok UPPKS se Kota Padang Panjang sebanyak 20 orang dan kunjungan lapangan ke Kelompok UPPKS SAKURA di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, mengikuti Gelar Dagang UPPKS tingkat Nasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka HARGANAS ke XVIII serta mengikuti Gelar Dagang UPPKS tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- e. Program Pelayanan Kontrasepsi

Pada Program Pelayanan Kontrasepsi dilaksanakan kegiatan dengan hasil :

1. Orientasi pemasangan kontrasepsi bagi bidan - bidan Klinik KB se Kota Padang Panjang dengan peserta sebanyak 50 orang dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan.
 2. Pemantapan kemitraan dalam bulan Bhakti IBI, TNI dan Bhayangkara.
- f. Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU

Pada Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU dilaksanakan kegiatan, dengan hasil terlaksananya orientasi untuk kader BKB yang terintegrasi dengan posyandu dan PADU dengan peserta sebanyak 663 orang dari Ketua Kader BKB Integrasi Posyandu PADU dan keluarga sasaran yang memiliki anak balita di Kota Padang Panjang.

- g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba

Pada Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dilaksanakan kegiatan dengan hasil terlaksananya Orientasi Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah selama 3 hari dengan peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari siswa tingkat SLTP dan Guru BK se Kota Padang Panjang.

Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, maka terlihat bahwa capaian dari akseptor KB secara fluktuatif terus berkembang di Kota Padang Panjang seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33
Target dan Realisasi Akseptor KB
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2012

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	1602	1524	36,84
2011	1483	2200	148,35
2012	3664	1350	95,01

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

13. Sosial

Pembangunan berbagai bidang di Kota Padang Panjang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun disadari upaya pembangunan tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masih perlu diupayakan peningkatannya.

Sejalan dengan upaya pemecahan masalah tersebut di atas maka prioritas pembangunan adalah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat khususnya PMKS, karena kesejahteraan merupakan dua sisi yang saling terkait satu sama lainnya, dimana semakin tinggi tingkat perekonomian akan menjadi semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan melalui program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mencakup 4 (empat) kriteria :

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Jaminan Sosial
- c. Pemberdayaan Sosial
- d. Perlindungan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdapat di Kota Padang Panjang diantaranya adalah kemiskinan, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Padang Panjang Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012
Kota Padang Panjang

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Fakir Miskin	863	
2.	Balita Terlantar	10	
3.	Anak Terlantar	146	
4.	Lanjut Usia Terlantar	202	
5.	Gepeng	24	
6.	Penyandang Cacat	243	
7.	Yatim /Piatu	180	
	Total	1.668	

Sumber : Profil Kota Padang Panjang Tahun 2012

Selama periode 2008-2012 pelaksanaan urusan sosial di Kota Padang Panjang dilakukan melalui beberapa program antara lain :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha sebanyak 253 orang KK miskin pada tahun 2008 - 2009 dan pelatihan berusaha bagi KK Miskin pada tahun 2012
2. Bimbingan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan berkelompok "KUBE" dan diberikannya bantuan alat - alat sebanyak 10 KUBE pada tahun 2008. Bimbingan sosial serta pemberian bantuan peralatan masak kepada 30 keluarga mandiri untuk dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan penghasilan pada tahun 2009

b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma

Pada Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma dilaksanakan kegiatan, dengan hasil kegiatan berupa pelatihan menjahit dan bimbingan mental bagi 10 orang penyandang cacat pada tahun 2008 - 2009, pelatihan menjahit Bordir dan pembuatan Bed Cover untuk 30 orang di tahun 2011 dan tahun 2012.

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Bimbingan untuk 80 orang PSM di tahun 2008 dan 93 orang PSM di tahun 2009. Pelatihan manajemen untuk 96 orang pengurus Karang Taruna se Kota Padang Panjang pada tahun 2009. Pelatihan Pengembangan PSM untuk 187 orang, pelatihan WKSMB untuk 219 orang, pertemuan sosialisasi kegiatan LK3 sebanyak 201 orang, rapat koordinasi PSM sebanyak 50 orang, pembinaan PSM sebanyak 5 kali kegiatan dan pembinaan WKSMB sebanyak 150 orang pada tahun 2010, pembuatan *leaflet* sebanyak 1.500 lembar dan pertemuan pembinaan lansia sebanyak 2 kegiatan, terlaksananya *study komperatif*/study banding ke PSM, pembuatan buku data PMKS sebanyak 10 buah, monitoring PMKS sebanyak 1 kali kegiatan dan terlaksananya kegiatan dialog interaktif LK3 di radio sebanyak 12 kali setiap tahun selama 5 tahun
2. Pembinaan pengurus panti, karang taruna dan organisasi sosial pada tahun 2012
3. Pemberian paket dan uang saku untuk kegiatan Anjang Sana, pembuatan Buku Profil TMP dan pembelian 1 paket bibit tanaman untuk Taman Makam Pahlawan.

d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Data PMKS di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota pada tahun 2009 dan terlaksananya pemberian bantuan biaya hidup untuk lansia terlantar sebanyak 35 orang dan untuk orang cacat berat sebanyak 15 orang pada tahun 2012.
2. Pelatihan bagi 20 orang tagana dan tersedianya perlengkapan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana antara lain genset sebanyak 18 unit, peralatan untuk dapur umum sebanyak 215 paket, radio HT sebanyak 6 unit serta kelengkapan kostum 20 orang tagana yaitu tas, baju kaos, sepatu bot, topi rimba, sarung tangan karet dan masker dan lain - lain pada tahun 2009 dan terlaksananya pembinaan untuk TAGANA pada tahun 2012.
3. Perbaikan rumah persemayaman dan gerbang serta pagar dan plaza upacara TMP Kusuma Sakti pada tahun 2009.
4. Pendampingan pemberian jaminan hidup untuk lanjut usia terlantar pada tahun 2012. Pendampingan pemberian jaminan hidup untuk penyandang cacat berat pada tahun 2012 dan endampingan pelaksanaan KUBE Fakir Miskin Perkotaan pada tahun 2012. Sosialisasi dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) pada tahun 2012
5. Pembangunan 1 unit gudang penanggulangan bencana pada tahun 2009
6. Terlaksananya pelatihan border dan menjahit bagi 10 orang anak nakal selama 60 hari serta bantuan peralatan modal bagi peserta pelatihan.

e. Program Pembinaan Anak Terlantar

Pada Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pelatihan kerajinan kulit bagi 20 orang anak terlantar selama 12 hari termasuk bantuan mesin dan peralatan modal pada tahun 2010.
2. Operasional rumah singgah dengan sasaran 20 orang anak KK miskin

f. Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Pada Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pelatihan menjahit, bimbingan mental dan bantuan peralatan mesin jahit bagi 10 orang penyandang cacat pada tahun 2009.
2. Pembinaan penyandang penyakit sosial dan teratasinya orang terlantar dalam perjalanan serta terlaksananya pengiriman penyandang penyakit sosial pada tahun 2010 dan tahun 2012

g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilaksanakan kegiatan dengan hasil terlaksananya pelatihan Karang Taruna sebanyak 128 orang, kunjungan ke lapangan 48 orang, bantuan *stimulan* untuk Karang Taruna se Kota Padang Panjang sebanyak 16 paket, terlaksananya rapat pembinaan Pengurus Karang Taruna dan Pertemuan Pembinaan Karang Taruna sebanyak 160 orang untuk tahun 2010 dan 2011.

14. Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008 sampai tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Adapun gambaran secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pada Program Peningkatan Kesempatan Kerja dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pelatihan cat duko, bordir, dan sepeda motor untuk 30 orang selama 1,5 bulan dilanjutkan dengan magang 1 bulan di berbagai perusahaan di Kota Padang Panjang pada tahun 2008, terlaksananya pelatihan sablon, pelatihan masak, pelatihan pertukangan dan pelatihan pembuatan aksesoris masing - masing sebanyak 2 kelompok.
2. Penyiaran informasi peluang kerja melalui radio, televisi dan media lainnya sebanyak 12 kali dan penerbitan buku bursa tenaga kerja masing - masing sebanyak 250 eksemplar, cetak leaflet sebanyak 1.000 lembar dan tersedianya blanko pencari kerja sebanyak 500 lembar

b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pada Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan bagi 120 orang pengusaha Kota Padang Panjang
2. Pemeriksaan audio metris untuk 40 pekerja, uji paru untuk 85 pekerja, pemeriksaan limbah 32 perusahaan, dan pengawasan wajib lapor perusahaan untuk 100 pengusaha serta terlaksananya pemeriksaan kesehatan,

pemeriksaan lingkungan, sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan dan pengawasan wajib lapor perusahaan untuk pengusaha

3. Pengawasan dan pembinaan terhadap 28 perusahaan sebanyak 9 kali kegiatan oleh 17 orang petugas pengawas.
4. Software database ketenagakerjaan dan buku database perusahaan sebanyak 50 eksemplar

c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, dilaksanakan kegiatan kegiatan, dengan hasil antara lain: Pelatihan bagi 30 orang pencari kerja selama 10 hari, terlaksananya pelatihan salon dan gunting rambut sebanyak 20 orang serta pelatihan bengkel kendaraan roda dua sebanyak 20 orang dan pelatihan menjahit kostum untuk 20 orang selama 33 hari dan Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur LPKS sebanyak 25 orang

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) merupakan lembaga ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Oleh karena itu koperasi dan UKM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi rakyat. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi daerah. ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh termasuk didalamnya Koperasi dan UKM. Jika kinerja Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga akan rapuh. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan Koperasi dan UKM melakukan mitra usaha dan menggiatkan jaringan usaha Koperasi dan UKM.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah diwujudkan dalam bentuk, keterlibatan sumber-sumber daya masyarakat, diselenggarakan dan dibawah kendali masyarakat dan bermuara pada hasil yang dinikmati seluruh anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Kota Padang Panjang tergabung dalam keanggotaan koperasi dan berusaha pada level Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun gambaran perkembangan koperasi di Kota Padang Panjang tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.35
Perkembangan Koperasi Tahun 2008-2012 Kota Padang Panjang

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota (orang)	Ket
1	2010	66	8074	
2	2011	71	9016	
3	2012	76	9652	

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan koperasi di Kota Padang Panjang cukup baik yang diiring dengan jumlah anggota. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pembinaan dan pembangunan perkoperasian di Kota Padang Panjang telah berjalan dengan baik.

Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padang Panjang periode 2008-2012 sangatlah dinamis dan kecenderungan meningkat, sedangkan pada Usaha Menengah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi, lebih disebabkan kepada mekanisme pasar, seperti persaingan, kehadiran produk sejenis dan daya beli masyarakat. Beberapa program yang telah dilakukan dalam rangka mendorong perkembangan UMKM di Kota Padang Panjang antara lain :

d. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Pada Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif ini dilaksanakan kegiatan , dengan hasil antara lain:

1. Pendataan UMKM Kota Padang Panjang, tersedianya database UMKM Kota Padang Panjang sebanyak 50 buah dan software database UMKM Kota Padang Panjang sebanyak 1 paket.
2. Pelatihan tata cara pembuatan dan pengajuan proposal pengembangan usaha bagi UMKM Padang Panjang yang diikuti 40 peserta.

e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ini dilaksanakan kegiatan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pendaftaran merk dagang UMKM yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 25 unit usaha serta bantuan pengurusan sertifikat halal bagi UMKM yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebanyak 20 unit usaha.
2. Pelatihan kewirausahaan yang diikuti 120 orang serta pelatihan motivasi bisnis bagi UMKM Kota Padang Panjang yang diikuti 20 orang.
3. Sosialisasi tentang HAKI bagi UMKM Kota Padang Panjang yang diikuti 100 orang.

f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dilaksanakan kegiatan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Temu konsultasi UMKM Kota Padang Panjang dengan Lembaga Perbankan tentang prosedur perolehan kredit yang diikuti oleh 190 peserta.
2. Pemantauan perkembangan dana bergulir yang dikelola koperasi yang ada di Kota Padang Panjang, terlaksananya sosialisasi tentang Koperasi Pola Syariah bagi aparat Pemerintah sebanyak 40 orang, tersedianya buku Profil Koperasi Pengelola Dana Bergulir sebanyak 60 buah buku serta tersedianya 1 buah papan visual elektronik koperasi.
3. Studi komperatif ke Koperasi dan Pokja Keuangan di Kota Payakumbuh yang diikuti oleh 20 orang pengurus koperasi yang mengelola dana bergulir.
4. Keikutsertaan UMKM Kota Padang Panjang dalam berbagai kegiatan pameran dan promosi di dalam dan luar daerah antara lain Festival Serambi Mekah, Festival Muharam, Festival Pedati, Padang Fair, Pameran Dekranasda, Batam Expo, Jakarta Fair (PRJ), terlaksananya rehabilitasi Gedung Promosi dan Pemasaran, tersedianya sarana pemasaran produk UMKM berupa 2 unit *counter* yang berlokasi di RSUD Ganting Kota Padang Panjang, terlaksananya pembuatan brosur produk kulit sebanyak 1.000 buah, pembuatan tas promosi sebanyak 100 buah, pengadaan lampu hias, kipas angin, baliho, *neon box* masing - masing 1 buah, *banner roll up* sebanyak 10 unit dan terlaksananya Seminar Regional Akselerasi Pengembangan Industri Kulit dan pemasarannya yang diikuti oleh pengusaha kulit dalam dan luar Provinsi.
5. Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kota Padang Panjang ke-222 Tahun 2012 di GOR Bancah Laweh Kota Padang Panjang.

16. Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Kota Padang Panjang selama periode Tahun 2008 sampai Tahun 2012 dilaksanakan oleh Bappeda Kota Padang

Panjang. Adapun gambaran umum hasil pelaksanaan program pada Urusan Penanaman Modal yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan hasil antara lain:

- a) Pameran investasi baik dalam daerah maupun diluar daerah
- b) Penyusunan Buku Data Investasi Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 5 paket. Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 1000 eksemplar. Penyusunan Buku Rekomendasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Kota Padang Panjang sebanyak 20 eksemplar. Dan penyusunan Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 160 eksemplar.

17. Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Adapun gambaran umum hasil pelaksanaan program kegiatan pada Urusan Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Pada Program Pengembangan Nilai Budaya dilaksanakan kegiatan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Penelitian oleh Badan Pengkajian Adat Budaya Daerah tentang Karakter Budaya Daerah Kota Padang Panjang dan untuk sosialisasi diikuti oleh Guru BAM SLTP se Kota Padang Panjang sebanyak 20 orang.
2. Kajian tentang kedudukan rokok dalam pelaksanaan kegiatan Adat Istiadat Minangkabau bagi masyarakat Kota Padang Panjang dan melalui kegiatan ini juga terlaksana Kolaborasi Musik Tradisi oleh ISI Padang Panjang pada acara Festival Serambi Mekkah tahun 2011.
3. Workshop yang menghasilkan Lembaga Pengkajian Adat dan Budaya Daerah Kota Padang Panjang.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan kegiatan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pertunjukan seni dalam acara penyambutan tamu, shotting TVRI dan Trans TV, pertunjukan luar daerah Pekan Budaya Sumatera Barat di Kabupaten Solok, pertunjukan Seni di Batam Expo, pertunjukan seni dalam acara Pembukaan Kemilau Sumatera di Jambi, pertunjukan seni Maling Kundang di Taman Ismail Marzuki, Parade Lagu Nusantara di TMII.
2. Pelatihan bagi anggota PKK Kelurahan dan PKK Kota Padang Panjang dengan jumlah 40 orang selama 4 hari. Pelatihan bagi 3 group Randai di 3 Nagari dan pelatihan Pasambahan bagi 9 group di Kelurahan. Pelatihan pakaian adat, pelatihan pasambahan manyerak bareh kunyik, pelatihan cara memakai tingkuluak tanduak dan pakaian adat daerah lainnya yang diikuti oleh PKK Kelurahan, Kecamatan dan Pengurus PKK Kota Padang Panjang dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Selain itu kegiatan ini juga menghasilkan pengadaan pakaian adat daerah Kota Padang Panjang berupa 1 stel lengkap Pakaian Adat Penganten Perempuan, 1 stel lengkap Pakaian Adat Penganten Pria, 1 stel lengkap Pakaian Bundo Kandung, 1 stel lengkap Pakaian Pasumandan dan 1 stel lengkap Pakaian Panghulu Kota Padang Panjang.
3. Rekaman Tari Piriang Suluah, Tari Bujang Sambilan, Rabano, Salawaik Dulang, Pupuik Baranak, Suliang Bambu, Pidato Adat, Dendang dan Silek Gunuang.

4. Penampilan kesenian luar daerah 2 kali, tingkat Provinsi (pekan budaya) 1 kali dan tingkat Kota 2 kali.
5. Pelatihan Pasambahan sebanyak 16 group, pelatihan Randai sebanyak 3 group, pelatihan Tari dan Musik sebanyak 9 group, pelatihan Silat sebanyak 3 group, workshop Seni dan Budaya sebanyak 30 orang, keikutsertaan Festival Seni dan Budaya 1 kali, atraksi Seni dan Budaya sebanyak 3 kali dan tersedianya pakaian tari sebanyak 36 stel, Indang sebanyak 40 buah dan Rebana sebanyak 2 buah.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan kegiatan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Terlaksananya pelatihan Tari dan Musik sejumlah 21 grup, pelatihan Randai 6 grup, pelatihan Silat 6 grup, Pelatihan Pasambahan 15 grup, pelatihan Qasidah Rebana 2 grup, pelatihan Nasyid 1 grup, pelatihan Pasambahan Manyerak Barih Kunyit dan adat Budaya Perkawinan Minangkabau untuk PKK, Dharma Wanita dan Bundo Kanduang se Kota Padang Panjang selama 5 tahun.
2. Terlaksananya Festival Serambi Mekah, Festival Muharam dan Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang.
3. Terlaksananya penampilan Paket Khusus di Anjungan Sumatera Barat TMII, mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN) di Solo, mengikuti Festival Pekan Budaya Bali, mengikuti Pekan Budaya Sumatera Barat di Payakumbuh dan pertunjukan kesenian Kota Padang Panjang dalam rangka penyambutan tamu pemerintah serta pelatihan tari, silat, Qasidah Rabana dan Nasyid.
4. Terlaksananya Festival Serambi Mekah berupa pertunjukan kesenian tradisi Minangkabau, berupa tari, randai, lagu minang musik modern, pertunjukan dari negara tetangga Malaysia dan kolaborasi musik tradisional oleh ISI Padang Panjang kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari.
5. Pendataan yang bertitik tolak pada bentuk seni dan budaya yang ada di Kota Padang Panjang yaitu Sanggar Randai 3 grup, Sanggar Pasambahan 16 grup, Sanggar Tari dan Musik 12 grup, Sanggar Silat 5 grup, Sanggar Qasidah Rebana 4 grup, Sanggar Nasyid 4 grup, Band 10 grup, Organ Tunggal 14 grup, Benda Cagar Budaya terdiri dari 6 jenis dan Usaha Pelaminan untuk 26 tempat. Selain itu juga dilakukan Penelitian Benda - Benda Peninggalan Bersejarah yang diidentifikasi sebagai Benda Cagar Budaya dan dibuat berbentuk buku sebanyak 56 buah buku.
6. Penelitian Kesenian Asli Daerah Padang Panjang dan langsung diseminarkan dengan jumlah peserta seminar sebanyak 100 orang dengan output 6 eksmplar buku. Kemudian di kegiatan ini terdapat pekerjaan Reproduksi Foto PDIKM dengan hasilnya sebanyak 563 lembar dengan berbagai ukuran (4 R, 10R, 1 M2), Frame foto sebanyak 148 unit, album 40 buku, baliho ukuran kecil 2 unit, baliho ukuran sedang 2 unit dan spanduk 1 unit serta pakaian budaya 36 stel.

18. Pemuda dan Olah Raga

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pada program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dilaksanakan kegiatan sebanyak 6 kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pelatihan bagi 30 orang mahasiswa - mahasiswa di universitas yang ada di Kota Padang Panjang untuk meningkatkan wawasan pemuda dalam beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan pemuda tersebut bisa menjadi pemimpin yang beriman.
 2. Penyusunan buku pedoman dalam pembinaan pembangunan generasi muda kedepan sebanyak 20 buah buku.
 3. Tersedianya 20 buah buku Pedoman untuk rancangan kegiatan antara generasi muda dan masyarakat.
 4. Penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan kepemudaan.
 5. penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat.
 6. Penyusunan kebijakan kewirausahaan untuk dikembangkan pemuda.
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilaksanakan kegiatan sebanyak 5 kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Seleksi terhadap 9 orang pemuda yang berasal dari unsur mahasiswa, pramuka dan karang taruna. Hasilnya terpilih 4 orang untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi. Di tingkat Provinsi terpilih 1 orang untuk mengikuti Bhakti Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Seleksi 200 orang siswa siswi SLTA se Kota Padang Panjang untuk memilih 75 orang guna dilatih sebagai anggota paskibraka, kemudian dipilih 65 orang untuk tingkat kota dan 4 orang untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Sumatera Barat dan 2 orang terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi.
3. Sosialisasi UU Pemuda, Olahraga dan Pramuka kepada Pengurus OSIS SLTA dan Pramuka se Kota Padang Panjang yang dilaksanakan selama 4 hari dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
4. Pembangunan pentas untuk kegiatan kepemudaan.
5. Seleksi 9 orang pemuda yang berasal dari unsur Mahasiswa, Pramuka dan Karang Taruna, kemudian 4 orang yang terpilih mengikuti seleksi di tingkat Provinsi. Di tingkat Provinsi terpilih 1 orang untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia di Malang dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi di Jambi.
6. Pembinaan terhadap pemuda pelopor sebanyak 3 kelompok yaitu di Kelurahan Balai - Balai, Kelurahan Tanah Pak Lambik dan Kelurahan Ngalau
7. Pelatihan Fasilitasi Sumpah Pemuda yang diikuti oleh 35 orang yang berasal dari siswa SLTA (anggota OSIS).
8. Pembinaan pada organisasi kepemudaan yang diikuti oleh 40 orang peserta dari Unsur Pramuka Penegak (SLTA) se Kota Padang Panjang.
9. Diklat kepemimpinan terhadap berbagai organisasi seperti KNPI, Pramuka, FKKT Kota dan dari Kelurahan sebanyak 35 orang.
10. Fasilitasi aksi bhakti sosial di Lingkungan Pusat Dokumentasi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang diikuti oleh 40 orang unsur Pramuka SLTA dan 12 orang Pembimbing Pramuka se Kota Padang Panjang. Kegiatan ini juga mengadakan alat percontohan untuk kegiatan kepramukaan berupa tenda pleton/komando, tenda *dome*, tali - tali dan kelengkapan kegiatan di alam terbuka.
11. Seleksi terhadap 67 orang pemuda yang berasal dari mahasiswa, Pramuka dan Karang Taruna, hasilnya terpilih 2 orang putra dan 2 orang putri untuk

mengikuti seleksi di tingkat Provinsi. Di tingkat Provinsi terpilih 2 orang untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Barat dan Bakti Pemuda Antar Provinsi di Bangka Belitung.

12. Pembinaan teknis terhadap 4 orang pemuda pelopor, pembinaan terhadap 35 orang dari unsur OKP, karang taruna dan remaja mesjid, pembinaan terhadap pemuda dari pengurus OSIS SLTA se Kota Padang Panjang sebanyak 40 orang, pembinaan kepada 2 orang pemuda pelopor.
 13. Fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gigi sebanyak 60 orang, donor darah sebanyak 60 orang dan bhakti OSIS sebanyak 40 orang.
 14. Pelatihan pengurus organisasi kepemudaan sejumlah 100 orang, pelatihan bagi 40 orang pemuda guna menggerakkan organisasi kepemudaan
- c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dengan kegiatan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda terhadap 6 kelompok usaha.
- d. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Pada Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dilaksanakan kegiatan sebanyak 3 kegiatan, dengan hasil antara lain: Pelatihan bagi guru olah raga sebanyak 40 orang tentang cara mengatasi cedera pada atlet serta pemberian gizi yang baik dan pemahaman tentang prosedur dana hibah, pelatihan Basket bagi 60 orang yang terdiri dari unsur guru-guru olahraga, unsur pengurus cabang dan unsur masyarakat, pembinaan terhadap guru-guru dan pembina/pelatih olah raga serta pengurus cabang se Kota Padang Panjang sejumlah 60 orang, pelatihan tentang peraturan dan permainan Futsal bagi guru - guru olahraga dan masyarakat Kota Padang Panjang sebanyak 42 orang, pembinaan terhadap pengurus organisasi olahraga sebanyak 30 orang, bintek keolahragaan terhadap pembina/pelatih sebanyak 30 orang dan pembinaan manajemen organisasi olah raga kepada pengurus cabang olah raga sebanyak 60 orang

- e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pada Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pelaksanaan pertandingan sepakbola antar LPM se Kota Padang Panjang, Atletik tingkat SD, SLTP, SLTA se Kota Padang Panjang, Volley Ball antar klub se Sumbar dan SD se Kota Padang Panjang, Tenis Meja tingkat SLTP dan SLTA se Kota Padang Panjang.
2. Pelatihan senam massal bagi lansia yang dilaksanakan setiap minggu selama 10 bulan.
3. Lomba Maraton 10 K tingkat Sumbar, Sepakbola Usia 35 ke atas dan PSPP All Star, Tenis Meja tingkat Sumbar, Panjat Tebing tingkat Sumbar, Bulu Tangkis antar SKPD se Kota Padang Panjang dan Tenis Lapangan tingkat Kota Padang Panjang.
4. Open turnamen bola voli antar klub di Sumbar dan antar Kelurahan se Kota Padang Panjang, lomba Marathon Padang Panjang 5K (5K tingkat SD se Kota Padang Panjang), LPM Cup III antar SLTP dan SLTA IPABASKO.
5. Pelatihan senam bagi 60 orang lansia selama 10 bulan.
6. latihan untuk 320 atlet dan 64 orang pelatih.
7. Liga Pendidikan Indonesia tingkat SLTA dan SLTP dalam Kota Padang Panjang, Lomba Lari 10 k tingkat Nasional, tingkat SLTP/SLTA dan tingkat SD dan pertandingan silat.

8. Pembinaan cabang - cabang olahraga yang mendapat medali di Pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat X di Sijunjung. Hasilnya terbina 7 cabang olahraga yang mendapat prestasi di provinsi Sumbar X.
9. Pertandingan dan lomba yaitu bola kaki, silat, Marathon 5 km tingkat SD, dan gerak jalan jantung sehat. Disamping pemantauan atlet pemasyarakatan olahraga.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dilaksanakan kegiatan sebanyak 2 kegiatan, dengan hasil antara lain, alat alat olahraga berupa 20 buah bola kaki, 1 paket sarana panjat tebing, 1 set meja pingpong, 8 buah raket tenis, 5 set jaring gawang dan 7 buah net tenis. Penyusunan Master Plan GOR Khatib Sulaiman, pengaspalan GOR Khatib Sulaiman dan rehab sedang/berat GOR Khatib Sulaiman. Pengadaan alat - alat olahraga, seperti bola kaki sebanyak 16 buah, bola voli sebanyak 16 buah, bola basket sebanyak 16 buah, net voli sebanyak 10 buah, bola tenis sebanyak 16 buah, bulu ayam sebanyak 10 buah, net badminton sebanyak 10 buah, bola takraw plastik sebanyak 8 buah, bola takraw rotan sebanyak 8 buah, pluit sebanyak 10 buah, skipping sebanyak 20 buah, net takraw sebanyak 5 buah, matras senam sebanyak 16 buah, stopwachth sebanyak 6 buah, lembing sebanyak 2 buah, tolak peluru sebanyak 2 buah, cakram sebanyak 2 buah, bola futsal sebanyak 16 buah, timbangan badan sebanyak 4 buah, jaring gawang futsal sebanyak 5 buah, badminton sebanyak 8 buah, kostum futsal sebanyak 5 stel, bola tenis meja sebanyak 150 buah, raket badminton sebanyak 3 buah, raket tenis sebanyak 4 buah, mistar/tiang lompat tinggi sebanyak 1 buah, balok star sebanyak 4 buah, kostum sepakbola sebanyak 18 stel dan jam catur digital sebanyak 6 buah. Pemeliharaan dan perbaikan gedung olahraga Bancah Laweh dan pemeliharaan gedung olahraga Khatib Sulaiman Bancah Laweh sebanyak 1 unit.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban daerah merupakan keberhasilan seluruh elemen baik dari jajaran pemerintah maupun masyarakat, utamanya aparat/perangkat keamanan dan ketertiban. Situasi keamanan dan ketertiban yang sejuk dan kondusif selama ini telah menjadi modal dan kekuatan bagi Kota Padang Panjang dalam melangsungkan praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberlangsungan dan kelancaran segala kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta jajarannya sudah tentu memerlukan dukungan suasana yang kondusif dan nyaman dari lingkungan yang melingkupinya. Harmonisasi antar warga dalam interaksi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang telah berjalan serasi selama ini sangat mendukung terhadap berbagai upaya yang dilakukan guna menciptakan dan mengembangkan tenggang rasa, toleransi, hormat menghormati, dan kesetiakawanan sosial antar berbagai unsur yang ada.

Selama periode 2008-2012 urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan pada dua SKPD, yaitu : Kantor Kesbangpol dan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Adapun pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat meliputi :

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain, Terlaksananya pelatihan bagi tenaga satlak PB dan anggota masyarakat sebanyak 1.050 orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan bencana, terbentuknya

Lembaga Penanggulangan Bencana di tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Padang Panjang.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dilaksanakan kegiatan:

1. Pelatihan Linmas bagi 1.066 tenaga Linmas Kota Padang Panjang pada tahun 2008 sampai dengan 2010 dan pengadaan 630 pakaian Linmas untuk tenaga Linmas Kota Padang Panjang pada tahun 2008 sampai dengan 2010
2. Rapat koordinasi KOMINDA (Komunitas Inteligen Daerah) setiap bulannya dalam rangka memantau situasi perkembangan daerah.
3. Bimtek dan penguatan kelembagaan FKPM bagi pengurus FKPM dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan pada tahun 2012 dan terselenggaranya pertemuan/Forum Kemitraan Polisi dan Kemasyarakatan agar tercipta stabilitas keamanan yang baik pada tahun 2011.

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pada Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan kegiatan dengan hasil antara lain:

1. Data dan pengawasan orang asing yang ada di Kota Padang Panjang pada tahun 2009 - 2012
2. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Pengurus Parpol, Pengurus Ormas, Guru SLTA dan SLTP, Lurah dan Camat sebanyak 196 orang peserta pada tahun 2012, terselenggaranya pelatihan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yang diikuti oleh perwakilan siswa SLTP dan SLTA beserta guru PKN/PMP di Kota Padang Panjang pada tahun 2011 dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan pada masyarakat Kota Padang Panjang pada tahun 2009.
3. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Padang Panjang sebanyak 150 orang pada tahun 2009 dan 2010 dan Rapat forum kerukunan umat beragama sebanyak 3 kali pada tahun 2012 dan terlaksananya FKUB yaitu pertemuan yang membahas hal terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama pada tahun 2011.

d. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pada Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan kegiatan dengan hasil antara lain:

1. Verifikasi kelengkapan administrasi Parpol yang menerima bantuan setiap tahun selama 5 tahun.
2. Sosialisasi peran Ormas dan LSM Kota Padang Panjang pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Sosialisasi Undang - Undang Partai Politik dan bantuan keuangan Partai Politik bagi pengurus Partai Politik pada tahun 2011 dan 2012. Asistensi pengelolaan bantuan keuangan Parpol yang diikuti oleh 9 Partai Politik yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus Parpol pada tahun 2012.
3. Laporan mengenai perkembangan dan upaya fasilitasi terhadap kelancaran Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur pada tahun 2010
4. Koordinasi forum - forum diskusi Politik yang menghasilkan beberapa kebijakan dalam upaya menciptakan kamtibmas dan stabilitas yang mantap di Kota Padang Panjang pada tahun 2009

5. Monitoring dan fasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilu 2009 yang dilaksanakan oleh tim koordinasi Pemilu.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) non pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan bertujuan mengakomodasi aspirasi dan memberdayakan masyarakat. LSM dapat mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu faktor penghambat investasi di suatu daerah adalah angka kriminalitas, perlunya kepastian jaminan keamanan dalam berinvestasi. Dalam hal ini situasi daerah yang tidak aman dan tidak kondusif para investor enggan untuk menanamkan modal di daerah.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah kabupaten dan kota mempunyai kewenangan besar untuk mendorong proses kebijakan menjadi lebih partisipatif, responsif, dan akuntabel karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah. Untuk itu salah satu isu kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersifat *good governance*.

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian semenjak tahun 2008 sampai tahun 2012 dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, DPPKAD, BKD, Inspektorat, Kecamatan dan KPPT. Keberhasilan mewujudkan proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi pada jalur dan arah yang benar selama rentang waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2008 - 2012, menuntut tanggung jawab yang tidak ringan pada tahun-tahun mendatang.

Tanggung jawab memelihara proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi yang ada agar tetap pada jalur dan arah yang benar sesuai amanat Konstitusi. Meningkatkan kualitas praktek-praktek kelembagaan, agar makin mampu memenuhi harapan perbaikan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, lebih jauh lagi wacana yang cukup mendasar adalah harapan bagi perlunya penajaman pola kerjasama antara eksekutif dan legislatif, sehingga memperbesar kapastian politis dan memperkecil potensi kesalah pahaman yang berimplikasi negatif bagi kinerja kedua lembaga penting tersebut pada setiap persoalan yang timbul. Perlunya mekanisme kontrol politis dari lembaga legislatif seringkali belum mendapatkan keseimbangan dengan harapan bagi peningkatan efektifitas lembaga eksekutif, serta berbagai dimensi perumusan dan penerapan kebijakan kelembagaan lainnya

Penyelesaian berbagai persoalan kelembagaan demokrasi yang ada, serta mempertahankan dan meningkatkan kinerja kelembagaan yang sudah mantap akan membantu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang dihadapi. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan sebagai lawan atau pesaing.

21. Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan program antara lain:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan hasil meningkatnya SDM dan keterampilan petani dengan melakukan pemberdayaan kelembagaan tani untuk peningkatan produksi pertanian, terlaksananya penilaian angka kredit bagi fungsional penyuluh pertanian dan terlaksananya pengadaan papan merk informasi kelompok tani.

- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dilaksanakan kegiatandengan hasil terlaksananya pelatihan padi tanam sabatang, temu teknis petani, petugas dan peneliti dan terlaksananya temu lapang (Field day).

- c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dilaksanakan kegiatandengan hasil kegiatan antara lain:

1. Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk kelompok wanita tani, terlaksananya bantuan bibit sayuran dan toga serta terlaksananya bantuan bahan pembuatan kompos. Pelatihan pangan, terlaksananya sosialisasi kewaspadaan pangan anak sekolah, terlaksananya pertemuan SKPG, terlaksananya pengadaan bibit sayuran dan terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan (P2WKSS).
2. Terlaksananya Studi Banding Petugas Teknis dan Penyuluh Pertanian, terlaksananya Sosialisasi Konsumsi Pangan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang), terlaksananya Pelatihan KWT (Kelompok Wanita Tani), terlaksananya bantuan bahan untuk Lomba Cipta Menu, pembuatan Leaflet Ketahanan Pangan, terlaksananya pembuatan buku analisis konsumsi pangan serta terlaksananya pembinaan dan evaluasi tunda jual/pekarangan.

- d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain: Terlaksananya magang pengolahan hasil ternak bagi penyuluh pertanian ke usaha susu Lembang Jawa Barat, magang pengolahan limbah ternak bagi penyuluh pertanian ke Cinagara Bogor, magang pengembangan tanaman hias bagi penyuluh pertanian ke Jawa Barat, pelatihan budidaya sayur organik bagi penyuluh pertanian, pengembangan tanaman hias bagi penyuluh pertanian, pelatihan budidaya sapi perah bagi penyuluh pertanian, pelatihan pengolahan hasil ternak bagi penyuluh pertanian, pelatihan pengolahan limbah ternak bagi penyuluh pertanian yang semuanya dilaksanakan di BPP Padang Panjang dan penyusunan buku program Kota dan Kecamatan Penyuluhan

Beberapa Tujuan dari kegiatan pembangunan ketahanan pangan adalah :

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas yang mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau diartikan pangan yang mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau

- c. Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas waktu guna mensinkronkan kebijakan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan
- d. Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang aman diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaedah agama
- e. Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang merata diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata diseluruh wilayah Kota Padang Panjang

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Adapun gambaran pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat ini tahun 2008-2012 terlihat dari berbagai program yang dilaksanakan.

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dilaksanakan kegiatan dengan hasil antara lain:

1. Bintek bagi pengurus LPM dalam pembangunan yang berbasis masyarakat dan studi banding untuk 145 orang selama 5 tahun.
2. Up dating data keluarga miskin oleh tim pengumpul, tim penghimpun dan pengolah data dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan buku Kumpulan Data Keluarga Miskin di Kota Padang Panjang
3. Bintek peningkatan peran dan fungsi kelompok pemelihara dan pemanfaatan hasil pembangunan bagi 60 orang masyarakat
4. Pemberian dana operasional LPM kepada 16 LPM Kelurahan dan dana operasional DPD Asosiasi LPM Kota Padang Panjang, studi lapangan LPM Kelurahan Berprestasi Kota Padang Panjang pemberian baju seragam RT dan Ketua LPM, pemberian dana operasional LPM kepada 16 Kelurahan, dana operasional LPM Kecamatan, studi lapangan LPM keluar daerah dengan peserta LPM Kelurahan se Kota Padang Panjang dan Pengurus DPD Asosiasi LPM Kota Padang Panjang, pelaksanaan musyawarah kerja LPM se Kota Padang Panjang dengan peserta pengurus LPM Kelurahan dan pengurus DPD Asosiasi Kota Padang Panjang.
5. Bintek yang diikuti oleh 60 orang peserta, terdiri dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, Pengurus KPP Kelurahan, SKPD terkait dan SPMN, pembentukan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat Prasarana Air Bersih, Air Minum dan Sanitasi di tiap Kelurahan.
6. Pemberian bantuan tunjangan hidup kepada 2 orang SPMN tahun 2012 yang ditempatkan di Kelurahan Kampung Manggis dan Kelurahan Ganting

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Sosialisasi tentang penggunaan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) berskala kecil untuk meningkatkan usaha industri rumah tangga dengan peserta sebanyak 60 orang. Bintek untuk meningkatkan pengetahuan wawasan serta informasi kepada 60 orang masyarakat miskin dan aparatur pemerintah tentang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), pada kegiatan ini juga dihasilkan belanja modal alat - alat TTG yaitu alat bantu perbaikan elektronik dan alat pertukangan. Pelatihan dan peningkatan

keahlian pengurus UEM - SP, masyarakat dan aparat pemerintah yang handal dalam mengelola UEM-SP sebanyak 60 orang. Bintek yang diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari pengurus UEM - SP Kelurahan se Kota Padang Panjang, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kota Padang Panjang dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

2. Magang 8 pengurus Pokja Kredit Mikro Nagari (KMN) ke Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka pembentukan Kelembagaan Keuangan Mikro di Kelurahan

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain:

1. Pelatihan bagi 32 orang dan peningkatan partisipasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Bintek bagi 60 orang masyarakat dalam pembangunan melalui badan keswadayaan masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan dan studi banding untuk 25 orang. Pelatihan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya bagi 60 orang masyarakat.
2. Perencanaan program PMT-AS tahun 2012, terlaksana orientasi pemantapan program PMT-AS bagi 60 orang anggota tim koordinasi, tim pengelola dan tim pelaksana sehingga PMT-AS dapat terlaksana sesuai dengan petunjuk teknis di setiap sekolah penerima di Kota Padang Panjang.
3. Terlaksananya bintek yang diikuti oleh 60 orang peserta untuk peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga lokal dalam melestarikan nilai - nilai budaya masyarakat.
4. Bintek penguatan kelembagaan pokja posyandu Kelurahan, pokjanal posyandu Kecamatan dan Kota dengan peserta sebanyak 60 orang, penilaian kader posyandu dan reward kader posyandu berprestasi yang mengikuti study banding kader posyandu tingkat Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jawa Barat dengan peserta sebanyak 3 orang, pemberian dana transport kader posyandu se Kota Padang Panjang sebanyak 455 orang, bantuan dana PMT Posyandu untuk 90 posyandu se Kota Padang Panjang dan pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu berupa Tripot, plang nama posyandu, timbangan gantung dan timbangan injak kepada 90 posyandu.
5. Monitoring dan penilaian dalam kegiatan Kelurahan berprestasi tingkat Kota Padang Panjang, BBGRM dan pelaksanaan dana hibah LPM.

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan dalam 5 kegiatan dengan hasil antara lain:

1. Pelatihan dan peningkatan pemahaman aparat pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan yang terdiri dari Seklur/Sekcam, KPM Kelurahan dan Seksi Lingkungan Hidup LPM dengan peserta 50 orang. Pelatihan aparat desa dan terhimpunnya data profil Kelurahan yang ada dari masing - masing Kelurahan se Kota Padang Panjang dengan peserta 60 orang. Pelatihan dalam bidang pemetaan kawasan kumuh di Kelurahan dengan peserta 270 orang dan tersedianya pemetaan kawasan kumuh/miskin di Kelurahan. Bintek tentang tugas dan fungsi RT dalam pembangunan di Kelurahan dan pembuatan buku Administrasi RT untuk 214 RT se Kota Padang Panjang

2. Data dasar profil Kelurahan sebagai data dasar yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan.
3. Sosialisasi untuk tim pendataan keluarga miskin sebanyak 233 orang yang terdiri dari 2 orang Kasi Sosial Kecamatan, 215 ketua RT se Kota Padang Panjang dan 16 Kasi Sosial se Kota Padang Panjang dan pencetakan 50 buku diseminasi informasi dan validitas data kemiskinan

e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Pada Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dilaksanakan kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Bintek bagi 60 orang anggota kelompok UP2K, pelatihan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera bagi 60 orang, Pelatihan Perempuan Pedesaan Dalam Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sebanyak 60 orang peserta. bimbingan teknis yang diikuti oleh 60 orang peserta dari keluarga sasaran/keluarga binaan di Kelurahan Silaing Atas
2. Bimbingan teknis yang diikuti oleh 56 orang peserta dari Kasi Sosial Kelurahan dan PKK Kelurahan se Kota Padang Panjang, bantuan transportasi untuk kader dasawisma sebanyak 678 kader dan pemberian buku sebanyak 678 kepada masing - masing kader dasawisma
3. Jambore PKK tingkat Kota Padang Panjang selama 4 hari, pembayaran honor panitia, honor tim penilai lomba dan stimulan peserta jambore @Rp.2.500.000,-/Kelurahan, mengikuti Jambore PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok selama 4 hari dengan peserta 100 orang

23. Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Bappeda melalui program Pengembangan data/Informasi. Beberapa kegiatan dalam pengembangan statistik daerah antara lain penyusunan Buku Indikator Kesra sebanyak 100 buah, Penyusunan Buku Padang Panjang Dalam Angka (PPDA) sebanyak 500 buah, Penyusunan Buku Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang sebanyak 600 buah, Penyusunan Buku Updating Data Kemiskinan sebanyak 60 buah, Penyusunan Buku Updating dan Analisis Statistik Daerah sebanyak 25 buah serta pelaksanaan Updating Sistem Informasi Geografis (SIG) Kota Padang Panjang. Berbagai hasil kegiatan tersebut di atas tentunya digunakan sebagai referensi perencanaan pembangunan ke depan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai sektor usaha.

24. Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, telah dilakukan kegiatan antara lain Penyelamatan dan pelestarian dokumen, melaksanakan bimbingan dan sosialisasi mengenai pengelolaan kearsipan kepada pengelola arsip di setiap SKPD sesuai dengan tata cara pengelolaan arsip statis maupun arsip dinamis, sehingga masing-masing SKPD mempunyai penata arsip. Apresiasi Kearsipan terhadap Kepala SKPD, KTU Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 114 orang pada tahun 2009 serta Tersusunnya dan diterbitkannya naskah sumber arsip sebagai memori daerah yang berisikan kumpulan arsip dan sinopsis proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2008 - 2013, dan sinopsis kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang periode 2004 - 2009 yang diterbitkan pada tahun 2010.

25. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota. Beberapa kegiatan dalam pengembangan urusan komunikasi dan informatika antara lain; Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dilaksanakan 1 kegiatan dengan hasil terhubungnya seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui jaringan interkoneksi pada seluruh SKPD dalam rangka mendukung SIPKD, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi untuk peningkatan *website* dan film *documenter* Padang Panjang Siaga Bencana, Penyusunan buku kerja pengembangan aplikasi *E-Government* SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 60 buah, pembinaan bagi pengusaha warnet, penambahan *server* dan pengembangan jaringan W-LAN antar SKPD, pembuatan *website* Pemerintah Kota Padang Panjang, perpanjangan sewa *hosting website* setiap tahunnya dan tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak/software aplikasi untuk penunjang SMS Center dan terlaksananya pengadaan alat komunikasi berupa HT (*Handy Talky*) sebanyak 14 buah, Program Kerjasama Informasi dan Mass Media, Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, hasil dari kegiatan ini adalah kerjasama penyiaran dengan media televisi yakni dengan TVRI berupa pemberitaan dan dialog interaktif. Dengan media radio berupa pemberitaan, liputan khusus dan dialog interaktif. Selain itu juga berlangganan media cetak harian dan mingguan serta publikasi/pariwara daerah. Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat, hasil dari kegiatan ini adalah pembuatan spanduk, baliho, agenda dan kalender pemerintah daerah, serta siaran keliling melalui mobil informasi sehingga terpublikasi seluruh kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

26. Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Peranan perpustakaan cukup penting dan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyediaan perpustakaan yang memadai dan dapat di akses oleh semua warga masyarakat sebenarnya telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Untuk itu tidak perlu diragukan lagi pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara demokratis menuju masyarakat madani, di samping sebagai pelestari nilai budaya dalam masyarakat yang terus berkembang.

Beberapa kegiatan pengembangan perpustakaan di Kota Padang Panjang dilakukan antara lain, pengadaan bahan pustaka berupa berbagai koleksi buku baik fiksi, maupun buku - buku ilmiah dengan jumlah pengadaan selama 5 tahun sejumlah 2.572 eksemplar. Lomba bercerita anak tingkat Sekolah Dasar yang diikuti oleh 78 murid SD se Kota Padang Panjang setiap tahunnya. Pelayanan Pustaka Keliling ke seluruh Kelurahan di Kota Padang Panjang sebanyak 54 kali kunjungan setiap tahunnya (selama 6 hari dalam 1 bulan) sejak tahun 2009. Seminar tentang Strategi Peningkatan Minat Baca yang diikuti oleh 60 orang peserta pada tahun 2009 dan Publikasi dan sosialisasi minat baca melalui pengadaan Baliho, Brosur dan Pamflet pada tahun 2010 dan 2012. Supervisi pembinaan dan stimulasi perpustakaan melalui monitoring/kunjungan ke Perpustakaan Sekolah sebanyak 12 kali pada tahun 2011 dan 36 kali pada tahun 2012, serta Bintek bagi Petugas Perpustakaan Kelurahan selama 2 hari dengan jumlah peserta 25 orang pada tahun 2011 dan Bintek Pengelola Perpustakaan Sekolah pada tahun 2012.

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Pada dasarnya Urusan Pilihan meliputi Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Beberapa urusan pilihan yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang antara lain :

1. Pertanian

Secara umum potensi pertanian di Kota Padang Panjang cukup beragam seperti sayuran, padi, jagung ubi jalar, cabe, terung, dan tanaman hias merupakan komoditas yang cukup prospektif untuk dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun luar Padang Panjang. Namun seiring dengan perkembangan Kota, maka telah terjadi alih fungsi lahan atau penyusutan lahan pertanian. Untuk itu berbagai usaha program intensifikasi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu, pertanian organik dan penerapan teknologi anjuran sudah berkembang. Berikut pada tabel dibawah ini disampaikan produktifitas komoditas pertanian Kota Padang Panjang.

Tabel 2.36
Produktifitas Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang
Tahun 2010-2012 (ton/tahun)

No.	Komoditas	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Padi	8302	8945	9443
2.	Jagung	51	163	92
3.	Ubi Kayu	181	520	667
4.	Ubi Jalar	524	701	845
5.	Kacang Tanah	8	23	29

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

Tanaman hias mempunyai peluang untuk diberdayakan sebagai komoditas komersial yang penting dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan petani tanaman hias dan devisa negara. Potensi untuk mengembangkan usaha tanaman hias sangatlah prospek dalam peluang pasar internasional.

Kota Padang Panjang termasuk salah satu daerah potensi pengembangan tanaman hias di Sumatera Barat yang didukung letak ketinggian dari permukaan laut, tipe iklim, curah hujan, tipe tanah, kesuburan tanah, dan temperatur udara. Tanaman hias yang cukup berkembang adalah tanaman hias palem jari/rapis waregu. Selain tanaman hias tersebut di Padang Panjang juga berkembang berbagai usaha bunga dengan berbagai jenis. Untuk pengembangan tanaman hias ini telah dilakukan pembinaan terhadap kelompok atau petani tanaman hias.

2. Perkebunan

Usaha perkebunan di Kota Padang Panjang berskala kecil (perkebunan rakyat) dengan lahan terbatas. Luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan dari tahun ke tahun mengalami penurunan sesuai perkembangan. Beberapa program pengembangan perkebunan telah dilakukan, diantaranya seperti penanaman bibit Kakao sebanyak 9.440 batang dan bibit Kopi 880 batang di Kelurahan Koto Katik untuk Kelompok Tani Mudo Sakato dengan anggota berjumlah 25 orang. Adapun gambaran perkembangan luas dan produksi komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.37
Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2012

No.	Komoditi	Tahun			Satuan
		2010	2011	2012	
1.	Kopi				
	Luas area tanam	69,0	69,5	69,5	Ha
	Produksi	36	33,5	34	Ton
2.	Kulit manis				
	Luas area tanam	165	128	128	Ha
	Produksi	70	70	68	Ton
3.	Cengkeh				
	Luas area tanam	9,5	8	8	Ha
	Produksi	7,12	7,5	7,75	Ton
4.	Tebu				
	Luas Areal Tanam	2,5	2,5	2,5	Ha
	Produksi	2,8	2,8	2,74	Ton
5.	Kapulaga				
	Luas Areal tanam	2,5	2,0	2,0	Ha
	Produksi	0,75	0,6	0,6	Ton
6.	Kelapa				
	Luas area tanam	10	10	10	Ha
	Produksi	6,5	6,5	6	Ton
7.	Coklat				
	Luas area tanam	16,10	17	17	Ha
	Produksi	18,3	25,3	25,3	Ton
8.	Pinang				
	Luas Area Tanam	11	12,5	12,5	Ha
	Produksi	7,5	5,25	5,25	Ton
9.	Jahe				
	Luas Area Tanam	9	6,5	6,5	Ha
	Produksi	19,25	17,5	17,5	Ton

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka dan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang

3. Peternakan

Pembangunan peternakan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan pengembangan peternakan rakyat, salah satunya yaitu dengan penguatan modal masyarakat. Di samping itu juga dilakukan pelayanan kesehatan ternak secara intensif, bimbingan usaha, temu agribisnis dan berbagai bentuk penyuluhan lainnya. Program pengembangan peternakan utamanya ditujukan pada pengembangan sapi potong dan sapi perah. Adapun gambaran perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38
Perkembangan Populasi Ternak Kota Padang Panjang
Tahun 2008-2012

No	Jenis Ternak (ekor)	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Sapi Perah	343	282	349
2.	Sapi Potong	607	371	422
3.	Kerbau	118	133	147
4.	Kuda	99	102	103
5.	Kambing	700	649	746
8.	Ayam Kampung	13.676	12.645	11.180

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

4. Perikanan

Pelaksanaan urusan perikanan, kebijakannya diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat petani ikan dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha perikanan sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha perikanan. Upaya pengembangan perikanan sesuai dengan potensi yang ada diarahkan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, pengembangan agribisnis perikanan, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan. Pengembangan budidaya perikanan darat di Kota Padang Panjang dilakukan melalui budidaya kolam air deras, kolam air tenang, keramba, dan perairan umum yang dikelola secara terbatas. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami.

Beberapa kegiatan pengembangan perikanan antara lain seperti, pengadaan bibit ikan unggul, bibit ikan sebanyak 135.000 ekor untuk KAD, 715.000 ekor untuk Mina Padi, bibit ikan untuk demplot Mina Padi seluas 1 ha di Kelurahan Ekor Lubuk, bantuan bibit ikan bagi petani ikan sebanyak 105.000, bantuan bibit ikan bagi petani ikan 30 KK ditambah 10 KWT, induk ikan unggul (Mas dan Nila) sebanyak 2 paket untuk BBI dan bibit ikan unggul untuk UPR Silaing Bawah sebanyak 2 paket, pengadaan induk ikan mas untuk UPR (Unit Pembenihan Rakyat) sebanyak 625 kg, pengadaan bibit ikan mas ukuran 8-12 cm untuk keramba, kolam air deras serta perairan umum sebanyak 61.250 ekor, pengadaan calon induk ikan Nila 2 paket serta pengadaan Ikan terapi. Pengadaan pakan ikan untuk petani KAD sebanyak 490 zak, 15.300 kg untuk Petani Ikan, 5.830 kg untuk UPR, Perairan Umum/Irigasi sebanyak 1.000 kg, KAT 1.000 kg dan BBI 1 paket. Pengadaan konstruksi reservoir berupa pembangunan kolam sebanyak 9 unit, kolam UPR (Unit Pembenihan Rakyat) sebanyak 3 unit, Kolam Keramba sebanyak 6 unit, kolam air deras sebanyak 44 unit, kolam air tenang sebanyak 1 paket, rehab saluran dan kolam sebanyak 2 paket. Pelaksanaan Magang ke BBPBAT Sukabumi, BPBIAT Wanayasa Purwakarta - Jawa Barat, Yayasan Baitul Ilmi Bogor - Jawa Barat yang diikuti sebanyak 35 orang. Pelaksanaan pelatihan bagi petani ikan se Kota Padang Panjang sebanyak 90 orang dan pengadaan calon induk ikan Nila sebanyak 2 paket. Pembangunan perairan umum/irigasi 5 lokasi dan Mina Padi sebanyak 4 lokasi dan anyar belanja bahan alat percontohan, pemeliharaan Ikan Lele dengan kolam terpal sebanyak 6 unit. Adapun perkembangan produksi perikanan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Perkembangan Produksi Perikanan Darat
Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012
(Ton/Tahun)

Jenis Usaha Perikanan	Tahun		
	2010	2011	2012
Kolam Air Tenang	368.54	424.38	368.54
Perairan Sungai	62.20	56.67	62.20
Mina Padi	20.19	29.22	20.19
Kolam Air Deras	21.30	30.51	48.35
Keramba	10.10	11.99	9.30

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

Dalam peningkatan kegiatan budidaya perikanan untuk peningkatan produksi juga diiringi dengan penyediaan benih unggul yang dikelola melalui Balai Benih Ikan (BBI) Kota Padang Panjang.

5. Kehutanan

Pelaksanaan urusan kehutanan di Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Sesuai dengan potensi yang ada, maka penembangan kehutanan bersifat skala kecil atau hutan rakyat dengan program pemanfaatan potensi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pembinaan sumber daya hutan. Hal ini bertujuan antara lain untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung lingkungan, mencegah banjir, tanah longsor, erosi, dan sekaligus untuk mendukung produktivitas sumber daya hutan dan lahan serta melestarikan keragaman hayati.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain penanaman sebanyak 4.400 batang pada lahan seluas 10 Ha di Kelurahan Koto Panjang, pelatihan petani sebanyak 50 orang, penyemaian bibit tanaman, pembuatan tempat penyemaian dan terlaksananya pengadaan belanja bahan/bibit tanaman, penanaman bibit tanaman sebanyak 9.680 batang, dengan rincian Gaharu sebanyak 4.400 batang, Kemiri sebanyak 880 batang, Surian sebanyak 1.200 batang, Mahoni sebanyak 1.200 batang, Durian sebanyak 600 batang, Petai sebanyak 600 batang, dan Alpokat sebanyak 800 batang pada Kelurahan Kampung Manggis (Kelompok Tani Penghijauan Jembatan Kayu Putih Permai 14 Ha) dan Kelurahan Silaing Bawah (Kelompok Tani Penghijauan Semoga Sukses 8 Ha), pelatihan Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan sebanyak 50 orang, pelatihan kelompok tani penghijauan sebanyak 29 orang, pembuatan Master Plan Kawasan Wisata Hutan dan sosialisasi peraturan kehutan bagi 130 orang serta pembinaan dan pengawasan hasil hutan oleh tim gabungan

6. Industri

Penyelenggaraan urusan industri di Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Perkembangan industri di Kota Padang Panjang pada umumnya berskala mikro atau home industri, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat seperti usaha makanan ringan seperti, jagung goreng, kerupuk talas, kerupuk ubi dan jenis kerupuk lainnya. Sedangkan industri usaha lainnya seperti usaha bordir, industri kulit, batu kapur dan usaha batako. Dalam pengembangan industri telah dilakukan berbagai usaha seperti pelatihan pengembangan usaha, bantuan peralatan dan bantuan modal serta bantuan pemasaran seperti promosi dan lain sebagainya. Diantara kegiatan yang telah dilakukan dalam pembinaan usaha industri seperti Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada 10 IKM Kota Padang Panjang, pelatihan Kerajinan/Handycraft bagi 20 IKM dan magang bagi 2 pengrajin sepatu ke industri sepatu Cibaduyut Bandung, bantuan peralatan bagi 10 IKM kulit, 6 IKM bordir, 6 IKM makanan ringan, 1 Kelompok Usaha Batako dan 1 Kelompok Usaha Peti Buah, Pelatihan peningkatan keterampilan bordir bagi 57 pengrajin yang dilengkapi dengan alat dan bahan untuk keperluan pelatihan seperti mesin jahit bordir, kain, benang dan lain-lain, pelatihan pembuatan barang jadi kulit bagi 40 pengrajin yang dilengkapi dengan alat dan bahan untuk keperluan pelatihan seperti mesin jahit kulit, mesin seset kulit, kulit asli dan sintetis, benang dan asesoris lainnya, penyediaan mesin peralatan bagi *workshop* kerajinan Kelurahan serta terlaksananya kerjasama produksi dan pemasaran dengan distributor sepatu Bukittinggi. Temu usaha bagi 60 IKM Makanan Ringan, Bordir dan Kerajinan/Handycraft Kota Padang Panjang dengan Pengusaha Sukses di dalam maupun di luar Provinsi Sumbar. Pembangunan 8 unit *workshop* kerajinan di Kelurahan. Pelatihan teknologi pengawetan makanan yang diikuti 40 peserta, pelatihan membuat kue kering/basah yang diikuti 60 peserta, pelatihan

pembuatan batako yang diikuti 20 peserta serta pelatihan pembuatan sepatu dan tas bagi 48 peserta yang dilengkapi dengan alat dan bahan untuk keperluan pelatihan seperti mesin jahit, mesin press, mesin cangklong, kulit dan lain – lain

7. Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Dalam pengembangan sektor perdagangan ini terdapat kendala seperti belum terbangunnya pasar yang representatif dan sering terjadinya kebakaran pasar. Namun demikian dengan segala upaya pengembangan berbagai sarana dan prasarana perdagangan terus dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh swasta, sehingga usaha perdagangan terus berkembang seperti toko swalayan dan ruko. Sedangkan perkembangan usaha kegiatan perdagangan juga dapat dilihat dari perkembangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.40
Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Kota Padang Panjang
Tahun 2010-2012

Tahun	Perusahaan Kecil (PK)	Perusahaan Menengah (PM)	Perusahaan Besar (PB)	Jumlah
2010	91	21	-	115
2011	46	14	-	60
2012	99	5	-	104

Sumber : Dinas Kop, UMKM, Indag Kota Padang Panjang, 2013

8. Pariwisata

Pengembangan urusan pariwisata juga merupakan kegiatan yang cukup strategis, sehingga dari tahun ke tahunnya kegiatannya terus mengalami peningkatan. Berbagai usaha pengembangan kepariwisataan terus diupayakan, baik dalam bentuk wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner. Objek wisata yang cukup terkenal di Padang Panjang antara lain adalah: MIFAN, Lubuk Mata Kucing, Goa Batu Batirai dan lainnya. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi PDIKM, berbagai bentuk kesenian tradisional seperti randai, pasambahan, sedangkan untuk wisata kuliner cukup. Disamping itu, perkembangan hotel dan restoran cukup pesat di Kota Padang Panjang. Adapun gambaran perkembangan kepariwisataan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Perkembangan Pariwisata di Kota Padang Panjang
Tahun 2009-2012

No	Uraian	Tahun				Satuan
		2009	2010	2011	2012	
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	331.129	351.513	255.208	328.583	Orang
2	Jumlah restoran, rumah makan	32	29	29	36	Unit
3	Jumlah hotel dan penginapan	13	12	13	18	Unit

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

Dari tabel di atas terlihat dari jumlah kunjungan wisata terus meningkat secara berfluktuasi selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2009 jumlah kunjungan wisata sebanyak 331.129 orang, meningkat menjadi 351.513 orang pada tahun

2010. Namun pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisata menurun lagi menjadi 255.208 orang, dan pada tahun 2012 naik menjadi 328.538 orang.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Secara umum daya saing daerah dapat dipandang sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah Kab/ Kota lainnya yang berdekatan dengan daerah, termasuk dalam hal ini persaingan dalam lingkup nasional atau internasional. Untuk melihat daya saing suatu daerah banyak indikator yang dapat dikemukakan, terutama indikator yang berkaitan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lainnya. Dalam konteks ini, beberapa indikator dalam aspek daya saing Kota Padang Panjang yang dapat dikemukakan antara lain:

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi daerah dimaksudkan adalah dilihat dari tingkat pengeluaran riil perkapita penduduk suatu daerah. Tingkat pengeluaran riil perkapita penduduk Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008 pengeluaran riil perkapita Kota Padang Panjang sebesar Rp.645.380 setiap bulan dan terus meningkat menjadi Rp.647.980,- per bulan. Capaiannya ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat, dimana untuk tahun tahun 2011 pengeluaran riil perkapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 635.730,-. Adapun perkembangan dan perbandingan pengeluaran riil perkapita Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Pengeluaran Riil Perkapita Kota Padang Panjang dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012

Nama Daerah	Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Rp.000,-)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Padang Panjang	645,38	645,60	646,57	647,98	650,36
Sumatera Barat	631,52	633,72	635,29	638,73	641,85

Sumber : Publikasi BPS

b. Indek Pembangunan Manusia

Indikator untuk melihat daya saing yang lain adalah dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan **Human Development Indeks (HDI)** adalah akumulasi pengukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Sekaitan dengan itu, angka IPM Kota Padang Panjang cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2009, IPM Kota Padang Panjang adalah sebesar 77,16, meningkat menjadi 77,45 pada tahun 2010. Sedangkan tahun 2011, IPM Kota Padang Panjang meningkat lagi menjadi 78,12 dan tahun 2012 juga meningkat menjadi 78,51.

Pencapaian IPM Kota Padang Panjang rata-rata lebih baik atau di atas IPM Provinsi Sumatera Barat, dimana IPM Kota Padang Panjang menempati urutan ketiga setelah Kota Bukittinggi dan Padang di Provinsi Sumatera Barat dan urutan ke 25 dari seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Adapun gambaran perkembangan IPM Kota Padang Panjang dan perbandingan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2012

Nama Daerah	IPM				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Padang Panjang	76,93	77,16	77,45	78,12	78,51
Sumatera Barat	72,96	73,44	73,78	74,28	74,70

Sumber : Publikasi BPS

c. Kualitas Tenaga kerja

Aspek daya saing daerah Kota Padang Panjang juga dapat dilihat dari aspek analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi dan rasio ketergantungan. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas
Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi
Kota Padang Panjang Tahun 2012

NO	Uraian	persentase
1.	Tidak/belum pernah sekolah	1.06
2.	Tidak/belum tamat SD	16.57
3.	SD/ sederajat	15.15
4.	SLTP/ sederajat	21.98
5.	SLTA/ sederajat	32.32
6.	Diploma I/II/III	4.46
7.	Diploma IV/S1	7.45
8.	S2/S3	1.01
	jumlah	100

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2013

d. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat daya saing Kota Padang Panjang juga dapat dilihat dari tingkat ketergantungan atau rasio ketergantungan. Hasil analisis terhadap rasio ketergantungan Kota Padang Panjang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Rasio Ketergantungan Kota Padang Panjang
Tahun 2007 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	17.073	17.283	15.201	15.380	14.919
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	2.938	2.976	3.267	2.368	2.628
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	20.011	20.259	18.468	17.748	17.547
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	34.206	34.621	28.600	29.871	30.640
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,58	0,59	0,65	0,59	0,57

Sumber data : Padang Panjang Dalam Angka (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa, jumlah penduduk usia tidak produktif yang merupakan jumlah penduduk berusia kurang dari 15 tahun ditambah dengan penduduk berusia lebih dari 64 tahun. Sejak tahun 2010 jumlah penduduk kelompok usia ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk usia tidak produktif di Kota Padang Panjang mencapai 17.547 jiwa atau 57,27 persen dibandingkan jumlah penduduk usia produktif. Jumlah ini atau turun 3,00 persen dari tahun 2011 yang berjumlah 17.748 jiwa. Penduduk berusia kurang dari 15 tahun mengalami sedikit penurunan jumlah. Kenaikan yang signifikan terjadi pada penduduk berusia lebih dari 64 tahun, yaitu naik sebesar 10,98 persen.

Penduduk usia produktif (penduduk berusia antara 15 – 64 tahun) pada tahun 2012 berjumlah 30.640 jiwa atau 63,59 persen. Jumlah ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,57 persen dibandingkan tahun 2011. Adapun rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif tahun 2012 mencapai 0,57. Rasio ini turun dari tahun 2011 yang sebesar 0,59.

a. Perkembangan Investasi

Salah satu upaya untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah adalah melalui pengembangan investasi. Dilihat dari aspek perkembangan investasi di Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, peningkatan nilai investasi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah investor. Secara umum investasi pembangunan di Kota Padang Panjang dapat dikategorikan dalam skala kecil dengan nilai investasi yang juga relatif juga masih kecil dimana secara keseluruhan masih bersifat PMDN. Adapun gambaran perkembangan investasi di Kota Padang Panjang Tahun 2008-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Perkembangan Investasi Kota Padang Panjang Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah Investor	Nilai (Rp.000)	
			PMDN	PMA
1	2008	29	249.998.565,00	-
2	2009	16	224.124.884,00	-
3	2010	48	474.891.384,00	-
4	2011	64	432.732.495,50	-
5	2012	99	515.610.260,52	-

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang (data diolah)